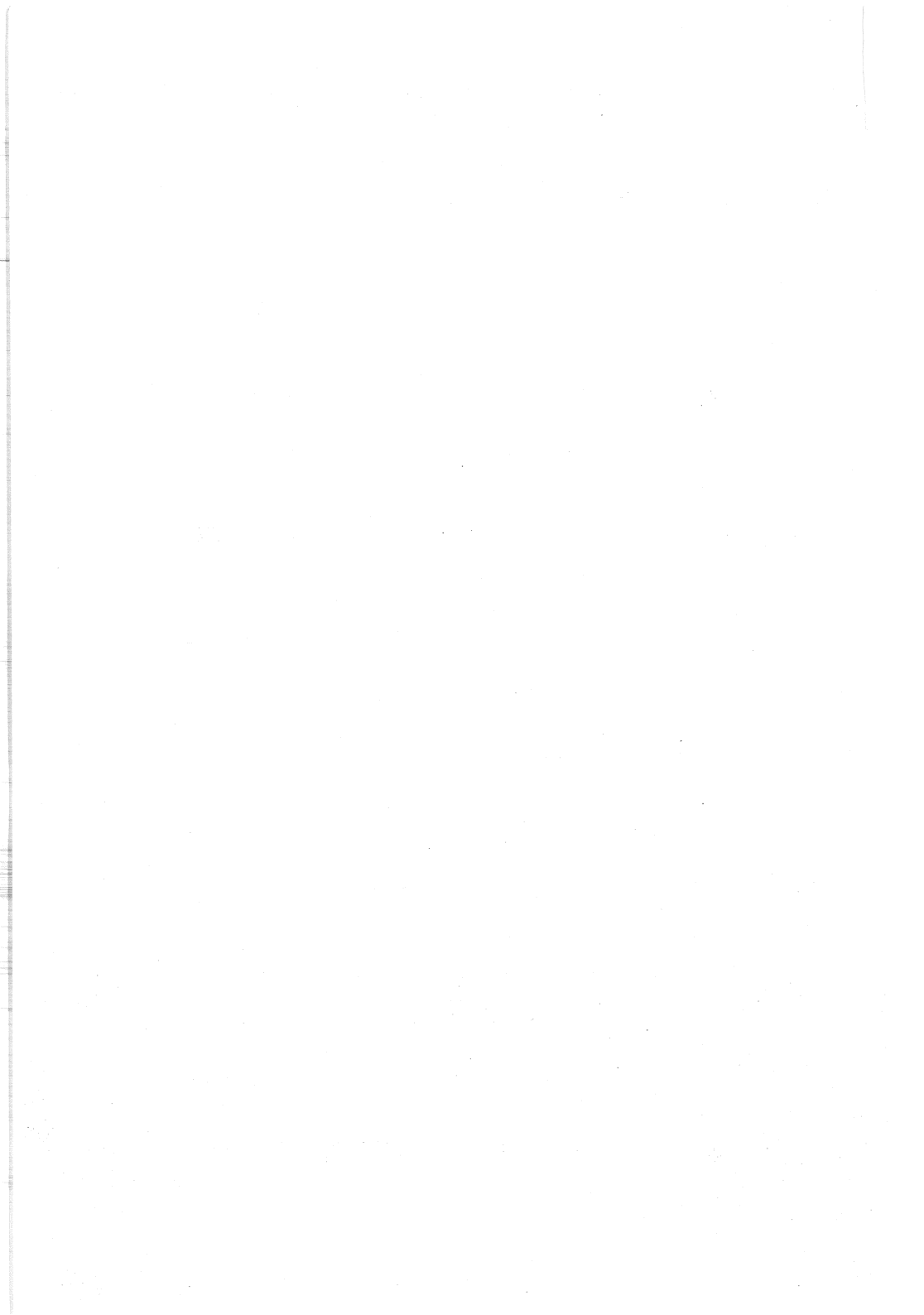


*P*olitik  
Kebudayaan  
*Otonomi Daerah*

Kasus Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat



*P*olitik  
Kebudayaan &  
*Otonomi Daerah*

Kasus Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Penulis :

Sutamat Arybowo  
Endang Retnowati  
Muh. Saleh Buchari, BM

Editor :

Sutamat Arybowo



L I P I

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

©2008 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)  
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan\*

Katalog dalam Terbitan

Politik Kebudayaan dan Otonomi Daerah (Kasus Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat)/Sutamat Arybowo, Endang Retnowati, Muh. Saleh  
Buchari, BM, Jakarta: LIPI Press, 2008

iii + 96 hlm; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-979-799-344-3

1. Politik Budaya
2. Otonomi Daerah

306. 2

Diterbitkan oleh:  
LIPI Press, anggota IKAPI



**L I P I**

\*Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Widya Graha Lt. VI dan IX,  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10  
Jakarta, 12710  
Telp.: 021-5701232 Fax.: 021-5701232



## KATA PENGANTAR

Penelitian tentang “Politik Kebudayaan dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat”, yang dilaksanakan Sdr. Sutamat Arybowo, Endang Retnowati, dan M. Saleh Buchari BM, pada dasarnya merupakan studi lanjutan yang mencoba melihat Ketahanan Budaya pada Era Globalisasi di Nusa Tenggara Barat. Ada tiga pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana masyarakat Mataram merepresentasikan identitas budayanya pada era Otonomi Daerah. Kedua, Apakah terdapat wacana yang digunakan masyarakat Mataram untuk membangun jati dirinya. Ketiga, Bagaimana masyarakat memaknai politik kebudayaan yang berkembang di Mataram dalam konteksnya dengan integrasi nasional dan globalisasi.

Sebagai kajian kebudayaan pertanyaan tersebut cukup menarik untuk dipermasalahkan. Hingga dewasa ini kajian kebudayaan (*cultural studies*) di Indonesia belum dianggap penting, karena itu selalu terlambat dibanding di negeri-negeri yang sudah maju seperti Eropa, Amerika, dan Australia. Di Indonesia, kajian kebudayaan masih memperbincangkan masalah-masalah besar dan belum menyentuh tema-tema yang dianggap kecil dan penting bagi kehidupan riil di tengah globalisasi sekarang ini. Tema-tema industri budaya, industri kreatif, atau ekonomi kreatif masih sedikit diperhatikan.

Oleh karena itu saya selaku Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI) sangat mengapresiasi kajian ini. Meskipun dari tahun ke tahun temanya seperti paradog dan instan, namun dalam pendekatannya selalu menunjukkan paradigmatik yang cukup signifikan. Sebagai kajian kebudayaan yang sangat terbatas waktunya, tentu banyak kelemahan-kelemahan, seperti dalam pepatah “tak ada gading yang tak retak”, untuk itu kami secara terbuka mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak.

Kepada semua pihak, antara lain Kepala Kesbang dan Linmas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota Mataram, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Universitas Mataram, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Para informan baik tokoh masyarakat kaum terpelajar maupun rakyat biasa yang tidak bisa kami sebut satu persatu di sini, kami menghaturkan beribu terima kasih.

Jakarta, Desember 2008

Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan  
Kebudayaan – LIPI

Ttd.

**Drs. Abdul Rachman Patji, MA**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN (Politik Kebudayaan di Mataram Sebuah Pemaknaan)</b> .....	1
<i>Oleh Sutamat Arybowo</i>	
<b>BAB II POLITIK KEBUDAYAAN DI MATARAM DALAM ADAT-ISTIADAT DAN NILAI-NILAI BUDAYA PADA ERA OTONOMI DAERAH</b> .....	15
<i>Oleh M. Saleh Buchari, BM</i>	
<b>BAB III WACANA POLITIK KEBUDAYAAN DI MATARAM PADA ERA GLOBALISASI</b> .....	41
<i>Oleh Endang Retnowati</i>	
<b>BAB IV PEMAKNAAN DAN KONTESTASI ANTAR KELOMPOK ELITE DI MATARAM DALAM MEREPRESENTASIKAN IDENTITAS KEBUDAYAAN</b> .....	73
<i>Oleh Sutamat Arybowo</i>	
<b>BAB V PENUTUP (Identitas Budaya dan Konstruksi Budaya)</b> .....	83
<i>Oleh Sutamat Arybowo, Endang Retnowati, Muh. Saleh Buchari, BM</i>	



---

---

# **BAB I**

---

---

## **PENDAHULUAN**

### **(Politik Kebudayaan di Mataram Sebuah Pemaknaan)**

Oleh Sutamat Arybowo

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

**S**ejak munculnya era Reformasi, hampir semua daerah di Indonesia masyarakatnya ikut melakukan eforia politik. Salah satunya adalah masyarakat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kota ini tidak jauh dari Pulau Bali dan memiliki kawasan wisata menarik, yaitu Senggigi yang banyak didatangi wisatawan mancanegara. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram terdiri atas enam kecamatan, yaitu Ampenan, Sekarbela, Mataram, Selaparang, Cakranegara, dan Sandubaya. Sebelum adanya pemekaran, Mataram merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lombok Barat yang sekaligus sebagai ibukotanya, kemudian ibukota kabupaten tersebut pindah di Giri Menang Gerung.

Sudah lama daerah Mataram dikenal sebagai bandar laut yang terletak di sebelah barat pulau Lombok. Ia juga merupakan bandar terbesar provinsi Nusa Tenggara Barat. Tiga bandar yang bersebelahan membentuk kawasan Mataram dari barat ke kiri, bandar Ampenan, Mataram dan Cakranegara. Ketiga bandar tersebut adalah bandar yang berlainan tetapi difungsikan bersama-sama. Dalam perkembangannya Ampenan merupakan sebuah bandar laut, Mataram merupakan pusat pemerintahan, dan Cakranegara merupakan pusat perniagaan. Tetapi sekarang bandar pelabuhan tersebut sudah pindah di daerah Lembar, karena Ampenan kurang memungkinkan lagi untuk pelabuhan penumpang khususnya transit dari pulau Bali.

Menurut sejarahnya, NTB sebelum tahun 1951 bernama Sunda Kecil termasuk dalam bekas wilayah Negara Indonesia Timur. Berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Timur tanggal 9 Mei 1949, Pulau Lombok tidak terdiri atas swapraja tetapi merupakan suatu daerah langsung yang diperintah oleh Hindia Belanda. Pada tahun 1946, dibentuk menjadi Neo Swapraja atau daerah yang menyelenggarakan urusan otonomi berdasarkan *Zelfbestuur Regelen* tahun 1938. Secara yuridis Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan enam Daerah Swatantra Tingkat II bawahannya sudah dibentuk sejak tanggal 14 Agustus 1958. Pemerintahan tetap berjalan seperti ketika dibentuk menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pembentukan daerah-daerah Swatantra se Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara berangsur yang dimulai pada tahun 1959 hingga tahun 1961.

Pada era Reformasi, daerah ini melaksanakan otonomi daerah di bawah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimulai tahun 2001. Pada saat ini istilah daerah tingkat I dan daerah tingkat II tidak berlaku. Juga istilah Kota Madya dan Kota Administrasi tidak digunakan lagi. Mulai saat ini Provinsi tersebut terdiri atas tujuh wilayah kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Bima ibukotanya di Raba, Kabupaten Dompu ibukotanya di Dompu, Kabupaten Lombok Barat ibukotanya di Mataram (sekarang di Giri Menang Gerung), Kabupaten Lombok Tengah ibukotanya di Praya, Kabupaten Lombok Timur ibukotanya di Selong, Kabupaten Sumbawa ibukotanya di Sumba Besar, Kota Bima ibukotanya di Bima, dan Kota Mataram ibukotanya di Mataram.

Jumlah penduduk NTB menurut Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2006 terdapat 4.015.102 jiwa. Sebagian besar penduduk mengumpul di Pulau Lombok, sehingga pulau-pulau lainnya jarang penduduk. Komoditi utama adalah bawang, kelapa, kopi, sapi, kerbau, dan sebagian penduduknya membuat garam. Selain itu terdapat potensi industri kerajinan rakyat, yaitu tenun, songket, kain purbasari, dan perhiasan mutiara. Juga potensi seni

pertunjukan cukup semarak, seperti gendang belek, komidi rudad, tari-tarian, dan sebagainya.

Di daerah NTB terdapat empat etnik besar yaitu Sasak, Bali, Sumbawa, dan Bima. Juga masih terdapat etnik lainnya, seperti Jawa, Madura, Bugis, Arab, Cina, India. Hampir semua etnik tersebut bertemu di Kota Mataram, karena kota ini yang paling ramai sebagai pusat pemerintahan. Beberapa aliran religi dan budaya cukup marak, antara lain: Muhamadiyah, Ahmadiyah, Nahdatul Wathon, Wetu Telu. Sejak era Reformasi, partai politik yang berkembang dan dapat kursi di DPRD adalah Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PBB dan PKB.

Pertemuan-pertemuan sosial, politik, dan kebudayaan di daerah Nusa Tenggara Barat yang dibawa oleh berbagai suku bangsa tersebut, telah menghasilkan akulturasi dan sinkretisme di bidang kebudayaan. Penelitian ini menganalisis tidak semua pertemuan kebudayaan tersebut, melainkan dibatasi pada bagaimana ketegangan kebudayaan yang terjadi pada dekade terakhir khususnya sejak daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat menyambut Reformasi dan era Otonomi Daerah. Pergulatan dalam rangka menemukan kembali identitas kebudayaan di daerah Mataram tampaknya menjadi masalah yang perlu diprioritaskan karena pada masa ini ketegangan antar etnik lokal yang lama dan etnik pendatang yang baru menjadi laten. Adapun pergulatan dalam rangka penemuan kembali identitas budaya di Mataram adalah sebagaimana tampak pada cara-cara elite Mataram membangun kebudayaannya melalui tanda-tanda budaya atau simbol-simbol kebudayaan. Selain itu bagaimana masyarakat Mataram merespon Otonomi Daerah dalam konteksnya dengan nasionalisme dan globalisasi dewasa ini.

Dewasa ini mengkaji sebuah kebudayaan berarti harus berani mendefinisikan kembali kebudayaan itu sendiri sebagai sebuah proses pemaknaan. Studi kebudayaan memberi ruang gerak secara leluasa untuk merespon pergeseran konteks semacam itu. Hal ini menunjukkan pula adanya perubahan perspektif sebagai respon atas perkembangan studi lapangan antropologi masa lalu. Ini berarti ada

kecerdasan melihat bidang-bidang kajian yang menyangkut keterbukaan penelitian kebudayaan, khususnya dalam melihat bagaimana makna kebudayaan mengalami konstruksi, reproduksi, dan dekonstruksi dalam berbagai sub-kultur (Abdullah, 2006: 9).

Apabila terjadi konstruksi dan reproduksi kebudayaan, berarti merupakan proses penegasan identitas budaya yang dilakukan oleh berbagai pertemuan-pertemuan kebudayaan yang dalam hal ini menegaskan eksistensi kebudayaan asalnya. Hal ini akan tampak dan diperlihatkan pada berbagai bentuk ekspresi kebudayaan yang direpresentasikan para elite kekuasaan yang ada di daerah Nusa Tenggara Barat. Kebudayaan dalam konteks semacam ini dihadirkan melalui dekonstruksi dan pertarungan makna yang menegaskan kehadiran identitas kelompok. Meskipun masing-masing kelompok cara merepresentasikan berbeda, tetapi dasar konstruksi dan reproduksi kebudayaan lebih disebabkan adanya usaha menghadirkan masa lalu ke dalam kehidupan masa kini.

Dalam kaitannya dengan realitas identitas budaya daerah Mataram di era Reformasi, perlu diadakan penelitian mengenai politik kebudayaan secara berimbang. Di berbagai daerah secara empirik kelihatan bahwa persoalan politik dalam praktiknya ternyata mencerminkan desain kebudayaannya. Tidak terkecuali daerah Mataram antara politik dengan kebudayaan dapat memiliki korelasi dan bila disinergikan merupakan kekuatan laten untuk mencapai tujuan, baik berupa hegemonisasi maupun dominasi kebudayaan, karena di daerah ini peran kelompok etnik dan pemuka agama masih memiliki pengaruh besar.

Penelitian yang membahas pelaksanaan otonomi daerah sudah beberapa kali dilakukan, baik implementasinya maupun eksesnya. Malah ada yang memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah memunculkan fenomena konflik etnik dan kultural, sehingga merupakan ancaman bagi nasionalisme dan integrasi nasional. Sebagai contoh sejak diperkenalkan otonomi daerah, kelompok etnik seolah dapat mengatur rumah tangga sendiri dan dapat menata eksistensi mereka. Tetapi terdapat dua kemungkinan



dari partisipasi kelompok etnik tersebut, yang pertama, bisa muncul kontestasi untuk menuntut hak mereka masing-masing, yang kedua, bergantung pada *bargaining position* yang ada dan mekanisme politik yang diterima di satu daerah. Dampaknya bisa terjadi marginalisasi kelompok etnik, konflik etnik dan agama, dan ada pula potensi disintegrasi provinsial di masa mendatang (Haba, 2002: 70).

Penelitian lain ada yang membahas kesadaran tentang pluralitas kebudayaan. Pada era Orde Baru semangat “bhineka tunggal ika” disosialisasikan sebagai sesuatu yang mengikat bangsa dari berbagai etnik dan kebudayaan. Dalam operasionalnya yang muncul adalah kebudayaan yang homogen, karena yang ditekankan hanya aspek tunggalnya. Lalu di era Reformasi, muncul persoalan sejauhmana penghargaan terhadap pluralisme itu. Dalam praktiknya sekarang ini justru muncul ketakutan akan terjadinya hegemoni maupun dominasi etnik (Probonegoro, dkk., 2001: 6). Ketakutan itu logis karena otonomi daerah yang diinterpretasikan seperti tersebut di atas membawa dampak, bahwa daerah hanya memperhatikan daerahnya saja, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Dalam hal ini daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, ingin menjadi kabupaten sendiri atau provinsi sendiri.

Selain itu hasil penelitian mengenai ketahanan budaya dan globalisasi di Indonesia, studi kasus di Mataram-NTB memperlihatkan bahwa moralitas globalisasi ternyata masih berorientasi pada modal dan keuntungan, sehingga kemiskinan dan pengangguran semakin bertambah, serta tertutupnya akses sosial budaya rakyat kecil akibat kebijakan pasar bebas yang membuat negara berkembang seperti Indonesia terpuruk secara sosial budaya. Di situ memperlihatkan bahwa keuntungan pasar bebas hanya bisa dinikmati oleh sekelompok pemilik modal. Perusahaan-perusahaan waralaba yang menyebar hingga ke daerah Mataram masih merupakan kepanjangan tangan dari pemilik modal di Jakarta. Secara budaya sangat jelas belum memberikan manfaat sebesarnya kecuali membukakan akses informasi dan keterbukaan budaya dari luar negeri bagi masyarakat Mataram (Retnowati & Arybowo, 2007).

Oleh karena itulah pada tahun kedua tema penelitian mengenai “Politik Kebudayaan dan Otonomi Daerah” menjadi sangat penting, karena untuk memahami persoalan kebudayaan lokal di daerah, dalam konteksnya dengan integrasi nasional dan globalisasi dewasa ini.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Praktik politik kebudayaan di daerah Mataram dipermasalahkan, karena dewasa ini untuk memahami perkembangan politik lokal dalam era Otonomi Daerah yang lebih holistik, ternyata banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, baik lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana masyarakat Mataram merepresentasikan identitas budayanya pada era Otonomi Daerah?
- (2) Apakah terdapat wacana yang digunakan masyarakat Mataram untuk membangun jatidirinya?
- (3) Bagaimana masyarakat memaknai politik kebudayaan yang berkembang di Mataram dalam konteksnya dengan integrasi nasional dan globalisasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini membahas politik kebudayaan yang berkembang di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat pada era Otonomi Daerah dalam konteksnya dengan integrasi nasional dewasa ini. Hal ini mengingat suatu politik “negara” tidak dapat dilepaskan dari budaya yang mendukungnya, sehingga seringkali konsep-konsep budaya terekspresikan dalam adat-istiadat masyarakatnya atau keseniannya, baik berupa musiknya, tariannya, nyanyiannya, maupun ceritanya.

Selain itu tujuan khusus penelitian ini adalah:

- (1) Mendeskripsikan masyarakat Mataram dalam merepresentasikan identitas budayanya pada era Otonomi Daerah.

- (2) Menjelaskan wacana yang digunakan masyarakat Mataram untuk membangun jatidirinya.
- (3) Menganalisis dan memahami makna politik kebudayaan yang berkembang di Mataram dalam konteksnya dengan integrasi nasional dan globalisasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara akademik penelitian ini dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih jelas mengenai dinamika masyarakat Mataram, Nusa Tenggara Barat dan kebudayaannya pada era globalisasi. Mengingat letak geografi daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terbuka, mudah sekali para migran berhenti di sini, sehingga daerah ini menjadi tempat pertemuan beraneka ragam budaya. Dalam kaitannya dengan politik kebudayaan, daerah ini mudah menjadi pertarungan kekuasaan (*power struggle*) antara berbagai kepentingan dan berbagai konstruksi wacana kebudayaan. Jadi hasil penelitian ini juga bisa memahami makna politik kebudayaan yang hegemonik dalam konteks masyarakat plural.

Studi ini juga dapat membuka wawasan pengetahuan tentang politik kebudayaan dari masa ke masa di daerah Mataram, Nusa Tenggara Barat yang mengalami pasang surut, sebagai refleksi diri untuk menumbuhkan ketahanan budaya bagi masyarakat Mataram, Nusa Tenggara Barat pada era mendatang.

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambil kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan daerah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, diharapkan masyarakat yang bersangkutanlah yang lebih mengetahuinya, sehingga intervensi atau campur tangan orang-orang di luar komunitasnya dapat diminimalisasikan.

Sudah tentu penelitian ini tidak mungkin dengan mudah dapat menyelesaikan persoalannya, karena hal itu lebih bergantung pada

kemauan politik dan kebijakan kebudayaan yang berada di luar jangkauan peneliti. Manfaat paling jauh yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah memberikan pemikiran-pemikiran alternatif pemecahan masalah berdasarkan kajian pustaka dan temuan-temuan lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## 1.5 Konsep Penelitian

Penelitian ini mencoba menerapkan konsep politik kebudayaan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan cara mengamati fenomena interaksi sosial-budaya yang terjadi pada teks dan konteks, sejauhmana masyarakat memandang tanda-tanda budaya atau simbol-simbol budaya dalam konteks lokal, nasional, dan global. Mengapa masyarakat memilih simbol-simbol budaya dalam memperjuangkan jati dirinya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, realitasnya yang muncul bukan sekedar percaturan Undang-Undang atau Peraturan Daerah, melainkan juga perebutan otoritas dan klaim-mengklaim kepemilikan khazanah budaya. Hal yang paling mencolok dalam perebutan itu adalah bagaimana elite merepresentasikan jati dirinya melalui identitas kebudayaannya, sehingga sering terjadi daur ulang sejarah. Masalah tersebut dalam perspektif kajian budaya dapat dikategorikan sebagai politik kebudayaan.

Politik kebudayaan adalah aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan dalam hal penamaan dan representasi yang mengkonstruksi pemaknaan, serta memberikan perhatian pada kontestasi makna dan sumber daya kebudayaan. Secara khusus telah dipelajari politik perbedaan, politik pemaknaan, atau politik representasi dalam kaitannya dengan etnisitas, identitas budaya, maupun ruang publik. Kekuasaan negara menjadi fasilitator untuk memunculkan ruang publik di mana kebudayaan dapat berkembang. Politik kebudayaan bisa mencakup kebijakan kebudayaan dan kritik kebudayaan yang masing-masing memiliki spesifikasi, dan dapat memberi sumbangan terhadap perspektif yang berkaitan (Barker, 2004: 367).

Politik kebudayaan bisa dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok etnik, atau oleh elite perseorangan. Dalam realitasnya masyarakat mayoritas tidak otomatis mendominasi yang minoritas, tetapi bisa juga sebaliknya bahwa kelompok yang minoritas dapat mendominasi kelompok yang mayoritas. Jadi dalam praktiknya, politik kebudayaan merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan mengenai penamaan budaya dan representasi yang mengkonstruksi pemaknaan budaya. Penamaan politik kebudayaan dan cara memahaminya mengandung pengertian yang lebih luas, yakni: kekuasaan untuk memberi nama; kekuasaan untuk merepresentasi akal sehat; kekuasaan untuk menciptakan “versi-versi resmi”; dan kekuasaan untuk merepresentasi dunia sosial yang sah.

Salah satu argumen kajian budaya di sini, bahwa budaya merupakan sebuah zona pertempuran di mana berbagai makna dan versi tentang dunia saling bersaing memperebutkan dominasi dan klaim pragmatis atas kebenaran. Makna dan kebenaran ranah kebudayaan terbentuk di dalam pola-pola kekuasaan. Dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa “kekuasaan untuk memberi nama” dan untuk membuat deskripsi-deskripsi tertentu adalah suatu wujud politik kebudayaan.

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pada tahap pertama, dilakukan pengumpulan sumber data baik primer maupun sekunder. Tahap kedua, memilih teori yang digunakan untuk mengkaji data yang dapat dipercaya. Tahap ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah diseleksi. Tahap keempat, membuat proses penulisan dan konstruksi dari keseluruhan hasil penelitian.

Di antara karakteristik metode kualitatif (Hendrarso, 2005: 168), dapat dijumpai seperti berikut: a) pendekatan kualitatif memandang bahwa realitas sosial itu merupakan hasil konstruksi pemikiran yang bersifat holistik; b) menganggap bahwa proses

penelitian itu tidak dapat dikatakan sebagai sepenuhnya bebas nilai; c) pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat kaku tetapi selalu disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Jadi metode kualitatif tampaknya lebih fleksibel, karena setelah fokus penelitian ditentukan, lalu dicari objek penelitian. Objek penelitian ini ditentukan secara sengaja yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian menentukan informan yang diperlukan selama penelitian. Di dalam penggunaan pendekatan ini tentu peneliti sadar, bahwa pendekatan ini mengandung kekurangan dan kelebihan seperti diuraikan di atas. Selain itu, perlu disadari bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif dari hal yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan paradigma kebudayaan melalui definisi sosial. Menurut Williams (1981) yang menjadi pokok persoalan paradigma ini bahwa kebudayaan adalah hasil pendeskripsian suatu cara hidup dan akibat-akibat dari suatu aksi serta interaksi sosial. Jadi kebudayaan bukan merupakan generik yang otomatis diwariskan, melainkan merupakan differensial yang harus diperjuangkan oleh masyarakat pendukungnya (Abdullah, 2006: 9-10). Sasaran penelitiannya adalah pemikiran yang bersifat intrasubjektif dan intersubjektif dari aksi interaksi sosial. Untuk menganalisis dan memahami fenomena tersebut dalam penelitian ini telah menggunakan metode *interpretative-understanding* atau lebih dikenal dengan metode *verstehen* (Bleicher, 2003: 395).

Selanjutnya mengingat penelitian ini mengkaji politik kebudayaan, maka peneliti berusaha menjelaskan makna subjektif menjadi objektif yang ada di lapangan. Jadi sasaran penelitian ini ingin memahami realitas masyarakat NTB dengan cara bagaimana realitas itu dibentuk. Oleh karenanya dalam memahami realitas tersebut, peneliti menggunakan metode *verstehen*. Pada sisi lain dapat dikatakan bahwa penelitian yang menggunakan *interpretative-understanding* (*verstehen*) dapat dipakai dalam penelitian kebudayaan, berarti berakar dari sebuah paradigma interpretatif,

sehingga penelitian ini secara tegas dikatakan menggunakan metode penelitian kualitatif.

## 1.7 Sistematika Laporan

Laporan hasil penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang terbagi atas: Bab pertama mengenai pendahuluan. Bab kedua mengenai pemaknaan politik kebudayaan dalam adat-istiadat yang dipraktikkan melalui nilai-nilai budaya. Bab ketiga mengenai perwujudan wacana politik kebudayaan pada era reformasi dan globalisasi. Bab keempat mengenai pemaknaan dan kontestasi antar kelompok atau elite dalam merepresentasikan identitas kebudayaan daerah. Kemudian bab terakhir merupakan penutup sekaligus kesimpulan hasil penelitian yang dirangkai dari keseluruhan analisis permasalahan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. 1973. Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1973. Surakarta: Badan Penerbit Sasongko Solo.
- , 2000. *Karakteristik Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- , 2007. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2006*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- , tt. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azhar, Muhammad Lalu-Mimbarman, dkk. 1996. *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Favorit Offset Mataram.

- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Books.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beilharz, Peter, (ed.). 2002. *Teori-teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bennett, T. 1992. Putting Policy into Cultural Studies. L. Crossberg, C. Nelson, and P. Treichler, (ed.). *Cultural Studies*. London and New York: Routledge.
- Bleicher, Josef. 2003. *Hermeneutika Kontemporer*. penerjemah Imam Khoiri. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. London: Tavistock Publications.
- Budiwanti, Erni, 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS.
- Christomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). 2004. *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
- Retnowati, Endang dan Sutamat Arybowo. 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia: Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Industri Maju di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- . 1994. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gramsci, Antonio. 1999. *Sejarah dan Budaya*. penerjemah Ira Puspitorini dkk. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington, (ed.). 2006. *Kebangkitan Peran Budaya*. Jakarta: LP3ES.



- Hendrarso, E.S. 2005. Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Bagong Suyanto dan Sutinah, (ed.). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media. p. 165-175.
- Kartodirdjo, Sartono. 2003. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- , 2006. *Cultural Studies dan Masalah Kebudayaan di Indonesia* (makalah). Seminar Peringatan Berdirinya Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, 20 Februari.
- Kleden, Ninuk. 2004. "Membaca Politik Identitas Melalui Seni Pertunjukan". Tommy Cristomy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: PPKB-UI. p. 201-214.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Masinambow, EKM. 2004. "Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya", dalam Cristomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Indonesia. p. 1-50.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi*. Jakarta: LP3ES.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: LPSP & PT Gramedia.
- Probonegoro, Ninuk Kleden, 2001. *Kesenian di Lombok: Representasi Dominasi Etnik*, Jakarta: PMB-LIPI.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Penerjemah Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto, (ed.) 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sutrisno, Mudji, dkk., (ed.) 2006. *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, (ed.) 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Thung Ju Lan, dkk. (ed.). 2002. *Etnisitas Dalam (Re)Konstruksi Identitas Lokal dan Nasional: Studi di Riau dan Mataram*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Tim Peneliti. 2001. *Laporan Penelitian Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta: PMB-LIPI dan The Ford Foundation.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.

---

---

## **BAB II**

---

---

# **POLITIK KEBUDAYAAN DI MATARAM DALAM ADAT-ISTIADAT DAN NILAI-NILAI BUDAYA PADA ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh Muh. Saleh Buchari, BM

### **2.1. Pengantar**

**M**ataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan sendirinya dibebani berbagai macam dan bentuk persoalan, apakah karena kedatangan para pencari kerja dari seluruh nusantara, ataukah wisatawan asing yang lama kelamaan menetap dan menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah setempat. Juga dihadapkan oleh imbas Pulau Dewata khususnya dari Denpasar Bali. Salah satu yang amat terasakan adalah adanya "*cottage atau bungalow*" di pantai Senggigi di Lombok Barat, sebagai tempat "*rendezvous*" dan membahas hal-hal yang berorientasi usaha serta bisnis yang menguntungkan termasuk menikmati keindahan pantai tersebut.

Dibalik usaha itu dengan sendirinya terbawa nuansa psikologis dan kultur yang diluar kebiasaan masyarakat sekitarnya yakni membawa serta pasangan yang belum tentu sebagai suami isteri. Perilaku itulah yang merupakan kurang bermartabat di mata masyarakat Lombok, khususnya Kota Mataram yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama khususnya Islam. Selain pengaruh tersebut, juga dampak globalisasi yang mempercepat terkikisnya peradaban yang menjadi kebudayaan masyarakat di Kota Mataram dan sekitarnya. Pada dasarnya masyarakat memiliki kearifan budaya lokal yang relatif sulit dipengaruhi oleh pengaruh luar, akan tetapi para pendukung kearifan itu dari generasi ke generasi tidak sama cara

mengejawantahkan sehingga lambat laun bergeser ke arah yang menyesuaikan keadaan lingkungan sekarang.

Di samping adanya globalisasi, juga arus informasi baik yang melalui media elektronik, media cetak dan sejenisnya maupun orang – perseorangan membawa kebiasaannya dari negara asal dan boleh jadi membuat kultur baru yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Ataukah kemungkinan mereka (pendatang) melakukan difusi budaya yang mencoba memodifikasi kebiasaannya yang diejawantahkan dalam bentuk tersendiri. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi, sebab di berbagai belahan bumi acap kali terlihat demikian itu pada peradaban masyarakat setempat. Hal seperti itu tentu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi setempat dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Namun demikian, disatu sisi masyarakat meningkat penghasilannya, tetapi pada sudut tertentu warga setempat dipojokkan oleh kebiasaan pendatang berpenampilan seakan tidak etis dilihat dari segi kaca mata orang Timur. Jika demikian halnya, berarti terjadi benturan nilai karena terselubung ada pertumbuhan ekonomi, tetapi peradaban masyarakat terusik dengan penampilan yang kurang etis dari orang asing itu.

Masyarakat Mataram yang mayoritas etnis Sasak amat kental dengan tradisi budaya Islamnya, meski ada beberapa pendukung budaya dan tradisi seperti agama Hindu dan Kristen (baik Katolik maupun Protestan), tetapi tetap memperlihatkan corak serta karakteristik para penganut agama masing-masing. Dengan demikian mereka memaknai agama sebagai suatu fenomena kultural dan sering bertujuan untuk menyingkap distorsi ataupun kesenjangan sosial antara pengejawantahan (perilaku) berdasarkan konteks serta standar budaya lokal, juga ketentuan normatif dari kitab suci yakni Al Qur'an dan aturan yang bersifat universal.

Jati diri masyarakat Sasak telah dibalut oleh tradisi lamanya dan menyatu dengan identitas ke-Islamannya. Dengan demikian Islam sudah menjadi tradisi yang berskala besar dari aspek kehidupan sehari – hari masyarakat suku bangsa Sasak. Simbol budaya masyarakat

setempat dapat dilihat dari bentuk-bentuk rumah, tempat peribadatan seperti masjid, surau, langgar, sekolah atau pesantren yang bertuliskan kaligrafi huruf Arab serta pura yang merupakan tempat sembahyang warga Hindu dan Gereja bagi umat Kristiani. Simbol itulah merupakan manifestasi dari para pendukung budaya masing-masing.

Makna simbolistik yang melekat pada masing-masing pendukung budaya di Kota Mataram, dicirikan dalam berbagai bentuk dari tempat domisili mereka.

## **2.2. Profil Kota Mataram**

### **2.2.1. Wilayah Administratif**

Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diapit oleh dua wilayah, yakni Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Pada tahun 2007 luas wilayah sebanyak 61.130 km<sup>2</sup> dengan jumlah kecamatan enam (6) pemerintahan, yaitu:

- |   |              |
|---|--------------|
| (1) Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah sebesar | 946.000 Ha   |
| (2) Kecamatan Sekarbela luas wilayah sebesar      | 1.032.000 Ha |
| (3) Kecamatan Mataram luas wilayah sebesar        | 1.076.473 Ha |
| (4) Kecamatan Selaparang luas wilayah sebesar     | 1.076.526 Ha |
| (5) Kecamatan Cakranegara luas wilayah sebesar    | 967.000 Ha   |
| (6) Kecamatan Sandubaya luas wilayahnya sebesar   | 1.032.001 Ha |

### **2.2.2. Kependudukan**

Kemudian dari kependudukan dapat dilihat berdasarkan data BPS tahun 2007 jumlah penduduk di Kota Mataram sebesar 356.141 orang. Jumlah tersebut penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan) sebesar 1.003 orang. Dengan jumlah penduduk tersebut, belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Mataram. Pada umumnya penduduk banyak dijumpai menumpuk di Kecamatan Ampenan, sehingga secara rata-rata kepadatan penduduk Mataram tercatat sebesar 5.810 jiwa setiap kilometer persegi. Di Ampenan

termasuk terpadat yang memiliki tingkat kepadatan rata-rata 7.472 orang per kilometer persegi.

### 2.2.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000 lalu, angkatan kerja saat itu berjumlah 124.777 orang. Dari sejumlah itu, sebagian besar mereka sebagai pekerja atau karyawan termasuk tenaga kerja kasar (59,72%). Sementara pekerja yang ditopang oleh keluarga dan anggota rumah tangga lainnya hanya 4,12%, serta tenaga kerja yang mandiri termasuk usaha sendiri sejumlah 31,55%. Dijumpai pula dalam data lapangan yang dikonfirmasi kepada Dinas Tenaga Kerja setempat, ada 4,61%.

Sektor yang banyak menyerap pekerja adalah di bidang Jasa sebesar 44,18%, sektor di bidang perdagangan sekitar 24,49% dan sektor pertanian 6,51%. Kemudian yang bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS-abdi negara) sejumlah 5.504 orang. PNS itu bervariasi tingkat pendidikan yang pernah mereka lakukan atau bersekolah. Ada sebesar 42% yang tingkat pendidikannya Sarjana (S1), Diploma (D3) sekitar 27%, yang berpendidikan tingkat SLTA 27%, sementara yang berpendidikan pada tingkat SLTP dan sekolah dasar masing-masing 2% (Mataram Dalam Angka, 2007 – 2008).

Berdasarkan data yang dielaborasi dari Mataram Dalam Angka 2007-2008 para pencari kerja khususnya yang berorientasi ke luar negeri baik tenaga kerja Indonesia maupun tenaga kerja wanita ada sejumlah 43.134 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 24.79 orang dan perempuan sebanyak 18.342 orang. Para pencari kerja ke luar negeri diberangkatkan oleh biro jasa, ada yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia dan ada pula melalui biro jasa *illegal* alias tidak resmi. Tenaga kerja dari jumlah sebanyak itu secara bertahap diberangkatkan sebagai mana dapat dilihat di bawah ini:

- (1) Bulan Januari diberangkatkan sejumlah 4.452 (2.380 pria–2.072 wanita)

- (2) Bulan Februari diberangkatkan sebesar 4.167 (2.925 pria – 1.242 wanita)
- (3) Bulan Maret diberangkatkan sekitar 4.128 (2.860 pria – 1.268 wanita)
- (4) Bulan April diberangkatkan sebanyak 4.208 (2.908 pria– 1.300 wanita)
- (5) Bulan Mei meninggalkan tanah sebesar 3.833 (2.385 pria– 1.448 wanita)
- (6) Bulan Juni berangkat kurang lebih 3.029 orang (1.343 pria – 1.686 wanita)
- (7) Bulan Juli bekerja di luar negeri sebesar 3.999 (1.826 pria– 2.173 wanita)
- (8) Bulan Agustus diberangkatkan sebesar 3.857 (2.047 pria– 1.810 wanita)
- (9) Bulan September berangkat sebanyak 2.381 (1.924 pria– 457 wanita)
- (10) Bulan Oktober bekerja di luar negeri 1.551 (939 pria – 612 wanita)
- (11) Bulan November bekerja di luar negeri 5.050 (1.707 pria– 3.343 wanita)
- (12) Bulan Desember bekerjadi luar negeri 2.479 orang (1.548 pria – 931 wanita)

Ada premis budaya yang menarik untuk disimak dan dicermati di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini khususnya di daerah tingkat dua Mataram atau Kota Mataram. Hal tersebut adalah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW), mereka itu sebagai salah satu penghasil devisa secara nasional maupun regional. Juga mereka sebagai pembawa uang segar atau “*cash money fresh*” di kampung halaman masing-masing di Kota Mataram. Dengan adanya dana segar secara otomatis merubah sendi kehidupan warga yang menjadi TKI dan TKW. Juga dapat dilihat maraknya bangunan tempat peribadatan utamanya masjid dibangun dengan indah dan megah pada setiap Rukun Warga (RW) sehingga setiap kelurahan dijumpai antara tiga sampai lima unit bangunan

masjid. Bahkan ada yang berdekatan antara masjid yang satu dengan masjid lainnya. Juga menjadi simbol kesejahteraan warga setempat manakala telah selesai menunaikan rukun Islam kelima yakni pergi Haji atau Hajjah ke Tanah Suci di Makkah Al-Muqarramah dan Madinah Al – Munawwarah.

Dikatakan simbol kesejahteraan karena untuk melaksanakan ibadah haji relatif membutuhkan biaya perjalanan besar antara Rp27 juta sampai Rp35 juta per-satu orang terutama kawasan Timur Indonesia termasuk NTB ini. Dikatakan sejahtera karena di dalam Al Qur'an dijelaskan yang arti tafsirnya bahwa umat "Islam dapat menunaikan rukun Islam kelima (menunaikan ibadah haji) bagi yang mampu". Kata 'mampu' dalam konteks ini sarat dengan nuansa dan makna simbolistik individu ataupun keluarga berada pada kondisi kehidupan yang mapan alias *ajek*. Simbol kemakmuran dapat pula dilihat pada kondisi dan keadaan rumah yang lengkap dengan perabot rumahtangga, memiliki sepeda motor ataupun mobil pribadi. Pemeluk agama Islam Kota Mataram sebesar 288.746 orang (sudah tergabung jenis laki – laki dan perempuan) data BPS 2007/2008.

#### **2.2.4. Sarana Peribadatan**

Berdasarkan data yang dielaborasi dari Pemda Tingkat II Kota Mataram, yakni:

- (1) Masjid sebanyak 210 unit, surau 150 unit dan musholla 107 unit
- (2) Gereja berjumlah 17 unit
- (3) Pura bagi yang beragama Hindu berjumlah 112 unit
- (4) Vihara bagi umat yang beragana Budha sekitar 3 unit dan
- (5) Klenteng bagi umat yang keturunan Tionghoa (Cina) satu unit.

Khusus tempat peribadatan warga Tionghoa yakni klenteng letaknya berada di Kecamatan Cakranegara, sementara tempat peribadatan lainnya menyebar secara merata di lima kecamatan se-Kota Mataram. Bagi pemeluk Agama Islam ada sejumlah 467 unit tempat sholat lima waktu (termasuk langgar atau surau dan musholla). Juga tempat peribadatan agama lainnya seperti pura (*pure*-bahasa Bali), gereja, vihara dan klenteng memperlihatkan karakteristik dan



kekhasan hasanah budaya bagi para pemeluknya. Hal itu mengindikasikan adanya kemajemukan yang satu sama lainnya dan tidak mengganggu keberadaannya di tengah masyarakat Kota Mataram. Interaksi sosial budaya selama ini terjalin dan terpelihara tidak mengusik roda dan dinamika kehidupan sehari-hari.

Di kalangan umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji tahun 2007-2008 sejumlah 1.126 orang yang tebagi dari tiga kecamatan, yaitu:

- (1) Kecamatan Ampenan jemaahnya 127 laki-laki dan 143 perempuan
- (2) Kecamatan Mataram jemaahnya 112 laki-laki dan 125 perempuan dan
- (3) Kecamatan Cakranegara jemaahnya 293 laki-laki dan 326 wanita.

Kemudian dari besaran para penyuluh dikalangan umat Islam berdasarkan tingkatnya dapat dilihat sebagai berikut:

- (1) Penyuluh berjumlah 110 orang
- (2) Ulama ada dalam kisaran 55 orang
- (3) Mubaliq ada sebesar 141 orang
- (4) Beperan sebagai pengkhotbah atau khatib sebanyak 641 orang
- (5) Imam dalam arti khusus berjumlah 712 orang
- (6) Remaja masjid 2.321 orang.

Ada makna yang amat kental di dalam budaya masyarakat suku Sasak, bilamana keuangan belum mencukupi untuk melakukan ibadah haji dan hajjah bersama atau berdua suami dan isteri, maka yang diutamakan lebih dahulu menunaikan rukun Islam kelima atau naik haji dan hajja adalah kaum perempuan alias isteri. Hal tersebut nuansa kulturalnya jelas memberikan prioritas utama kepada kaum wanita sebagai tulang punggung menata sendi-sendi kehidupan rumah tangga terutama memelihara anak-anak hingga memasuki usia dewasa ataupun aqil-baliq. Sikap demikian itu hampir merata bagi umat Islam yang memberi keutamaan kepada sang isteri atau anak perempuan guna menunaikan rukun Islam yang kelima. Alasan budaya seperti itu dijumpai juga di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Barat. Bahkan umat Islam di Pulau Jawa dan Sumatera acap kali dijumpai

pola seperti di Mataram. Jika demikian halnya berarti ada budaya yang bersifat universal diterapkan pada lingkungan masyarakat tertentu khususnya yang beragama Islam.

Kemudian bagi warga yang beragama Hindu juga mempunyai karakteristik tersendiri, terlihat dari struktur dan arsitektur bangunan rumahnya. Setiap bangunan utama senantiasa di dampingi oleh bangunan lainnya guna persiapan upacara dan ritual keagamaan serta dilengkapi dengan *pure* dan atau tempat penyimpanan sesajen sebagai manifestasi persembahan kepada “*Shang Hyang Widhi Wasa*” (Tuhan Yang Maha Esa).

Ciri khas rumah bagi warga beragama Hindu tidak ada perbedaan antara masyarakat Hindu di Bali dengan warga Hindu di Kota Mataram, bahkan di wilayah manapun di Nusantara ini. Setiap ada rumah utama warga Hindu acap kali didampingi oleh bangunan lainnya dan tempat sesajen pada pojok depan rumah mereka. Kekhasan tersebut tidak berubah dari generasi ke generasi berikutnya sebagai pewaris nilai kultur dan peradaban mereka.

Di dalam budaya Hindu ada beberapa hari-hari tertentu dan salah satunya disebut sebagai hari raya “Galungan” yang artinya pergulatan dalam diri manusia (pencarian hidup). Persiapan menyambut hari Galungan kurang lebih empat puluh dua (42) hari sebelum sampai hari “H”. Galungan itu mempunyai makna “Dharma” yang mengacu pada pembersihan diri dari perilaku yang buruk dan mereka sebutkan sebagai “A Dharma” Peringatan Galungan biasanya dilaksanakan setiap 210 hari dan jatuh pada hari Rabu Kliwon. Pendukung agama Hindu berjumlah 56.041 jiwa (berdasarkan data BPS Kota Mataram 2007/2008).

## **2.3. Pranata Sosial**

### **2.3.1. Prasarana pendidikan**

Sekolah taman kanak-kanak di Kota Mataram sejumlah 95 unit dengan murid sebanyak 5.603 orang serta guru sekitar 417 pengajar. Sekolah dasar negeri sebanyak 144 unit, dengan jumlah

murid 42.778 orang dan guru sebanyak 1.786 pengajar. Sekolah dasar swasta berjumlah tujuh (7) unit dengan jumlah murid 1.598 orang dan guru 98 pengajar. Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) berjumlah 20 unit dan sebanyak 15.098 murid serta 930 guru. Sekolah menengah atas negeri (SMAN) sekitar 8 (delapan) unit dengan jumlah 5.939 siswa dan 408 guru. Sementara sekolah menengah atas swasta memiliki 23 unit dengan jumlah 9.764 siswa serta 804 staf pengajar. Ada pula sekolah menengah atas tingkat kejuruan sekitar tujuh (7) unit dengan jumlah 4.728 siswa dan 442 staf pengajar.

Juga terdapat sekolah yang berkonsentrasi pada pendidikan agama seperti madrasah aliyah yang sederajat dengan sekolah menengah atas dengan jumlah dua (2) unit bangunan dan sebanyak 635 siswa serta 150 staf pengajar honorer dan 11 guru yang berstatus pegawai negeri.

Di Daerah Tingkat II Kota Mataram terdapat tiga (3) perguruan tinggi yang statusnya negeri dan 19 perguruan tinggi swasta. Jumlah mahasiswa S1 sebanyak 10.538 orang, yang mengambil program magister (S2) 400 orang dan mahasiswa yang mengambil program D3 (sederajat sarjana muda) sebanyak 2.310 orang. Tenaga edukatif yang ada di Universitas Mataram sejumlah 942 tenaga pengajar. Sementara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) adalah 11 laki-laki tenaga pengajar tetap tingkat pendidikan S1, 32 orang tenaga honorer, tiga perempuan tenaga akademik tetap tingkat pendidikan S1 dan 6 (enam) wanita tenaga akademik tidak tetap (tenaga honorer).

Tenaga akademik yang memiliki jenjang pendidikan S2 dan mengajar di IAIN sebanyak 110 laki-laki sebagai tenaga akademik tetap dan 59 tenaga pengajar tidak tetap. Sementara tenaga akademik tetap wanita berjumlah 16 orang memiliki ijazah S2 dan 13 tenaga pengajar tidak tetap dengan tingkat pendidikan S2. Dosen yang tetap berijazah S3 hanya empat (4) orang sebagai tenaga akademik tetap dan satu tidak tetap alias honorer serta seorang perempuan berpendidikan S3 sebagai tenaga akademik tetap. Jumlah keseluruhan tenaga akademik sebanyak 256 orang. Pada tahun 2007 jumlah

mahasiswa IAIN Mataram berjumlah 1.421 laki-laki dan 1.481 perempuan, berarti total 2.902 mahasiswa.

### **2.3.2. Akulturasi Agama dan Budaya**

Di Kota Mataram ini, ada kekhasan yang merupakan justifikasi atau pembenaran budaya masyarakat yang tidak dimiliki oleh wilayah lain di Nusantara ini, hal yang dimaksud adalah budaya yang melebur dalam agama sehingga ada kata “adat diagamakan dan agama diadatkan”. Salah satu agama yang amat menonjol adalah agama Hindu, yang sudah merupakan pedoman hidup dan tuntunan untuk mendekati diri kepada Tuhannya. Kepercayaan Hindu – Majapahit masuk di abad ke-tujuh Masehi. Para umat yang menganut kepercayaan (agama) tersebut, hampir sudah tidak dapat lagi membedakan yang mana pola budaya asli dan mana kepercayaan sebagai pedoman hidup dikarenakan oleh akulturasi budaya secara sistematis dan permanen. Juga pada penganut agama Islam, masyarakat Suku Sasak sebelum menganut agama Islam, Suku Sasak mempercayai adanya kekuatan gaib melalui pemujaan terhadap roh – roh para leluhur yang berarti masih kepercayaan animisme dan roh – roh penunggu yang mendiami berbagai tempat seperti gua, gunung, batu, pohon, sungai, sawah dan rumah serta tempat lainnya. Karakter pemujaan seperti itu masih dalam kategori “Dinamisme” (bandingkan Erni, 2005).

Agama Islam melakukan akulturasi dengan kepercayaan masyarakat setempat diawali pada abad 13 Masehi. Pembawa misi ini adalah salah satu dari Wali Songo yaitu Susuhunan Ratu Giri (putranya Pangeran Prapen). Kala itu warga setempat khusus Pulau Lombok dan Sumbawa, Pangeran Prapen pertama kali menginjakkan kakinya di Labuan Carik (sekarang menjadi kota Kecamatan Bayan).

Disebut juga Laut Anyar merupakan pusat penyebaran agama Islam di Lombok. Sebelum menganut agama Islam, warga Sasak Bayan melaksanakan ritual berdasarkan kepercayaan animisme dan Hinduisme. Pangeran Prapen itu dengan sendirinya mempunyai rombongan dan melanjutkan misinya ke Pulau Sumbawa.

Dibalik kekuatan pengaruh agama Islam di awal kedatangannya, warga setempat masih mempercayai adanya tradisi ataupun kebiasaan lama yang berpusat pada pemujaan sebagaimana layaknya melakukan ritual terhadap Tuhannya ataupun pemujaan terhadap roh-roh. Ada sekelompok kecil warga yang beragama Islam memaknai pemujaan itu sebagai pengejawantahan yang bersifat dikotomi. Pada satu sisi, aktif menjalankan ibadah secara Islam dan sisi lainnya masih melakukan pemujaan pada tempat tertentu dengan memberi sesembahan. Hal inilah yang didalam agam Islam disebut “syirik” menduakan Tuhan. Itulah yang terjadi hingga beberapa waktu berselang.

Fase kedatangan misi dari Kerajaan Makassar di Pulau Lombok akhir abad 16 dan langsung menguasai Selaparang (sekarang menjadi salah satu kecamatan dan sebagian kecil wilayahnya dijadikan bandar udara). Selaparang merupakan pusat kerajaan masyarakat Sasak, kedatangan orang Makassar semakin memperkuat syiar agama Islam hingga merambah ke Pulau Sumbawa. Meskipun ajaran agama Islam semakin eksis dan mantap di wilayah ini, namun masih memiliki celah bagi pengembangan agama lain seperti pengaruh agama Hindu khususnya di Lombok Barat kala itu.

Ada intervensi dan berhasil menyusup ke wilayah Lombok Barat yakni pengaruh kerajaan Bali yang berasal dari Karangasem. Pada tahun 1740 M mengalami pergantian kekuasaan sehingga proses mengIslamkan masyarakat Lombok agak terhambat. Tersendatnya Islamisasi itu yang dilakukan oleh salah satu dari Wali Songo dan utusan Kerajaan Makassar, membuka peluang bagi kerajaan Hindu-Bali. Hal tersebut relatif memudahkan pengembangan ajaran agama Hindu dikarenakan sejak awal masyarakat setempat sudah mengenal nilai-nilai yang dianut oleh ajaran Hindu. Adanya rentang waktu yang relatif lama serta pergantian dari satu generasi ke generasi berikutnya memberikan kontribusi secara alami terhadap ajaran yang berkembang di wilayah tersebut (Pulau Lombok Sumbawa dan sekitarnya).

Dengan demikian tidak mengherankan apabila terdapat beberapa nuansa kultural berbalut agama seperti halnya tradisi keagamaan yang sarat dengan warna bermuatan tradisi lokal. Situs-situs dan artefak masih terlihat di wilayah tertentu termasuk di Bayan bagi masyarakat Sasak. Peninggalan sejarah kepurbakalaan itu melambangkan adanya jejak kekuasaan dan keberadaan masa silam yang amat berpengaruh terhadap tata nilai serta kultur warga setempat. Berbaurnya nilai kultur dengan agama yang dianut oleh masyarakat, mencerminkan kualitas hidup dalam peradaban anak manusia dan itulah yang dinamakan akulturasi. Bukan hanya penerimaan agama sebagai pengejawantahan sehari-hari, akan tetapi telah dijadikan sebagai pedoman hidup dan diterapkan sebagai pola perilaku sehingga menjadi kebiasaan, maka itulah dinamakan budaya sebab sudah menjadi kelakuan dan kebiasaan setiap hari. Dengan terejawantahnya kebiasaan tersebut secara pragmatis menjadikan satu acuan dasar pola hidup suatu masyarakat yang berperadaban.

### **2.3.3. Dampak Keberadaan Partai**

Kurun waktu dua tahun terakhir ini di mana-mana partai politik sibuk membenahi diri masing-masing. Ada yang sudah lama berdiri seperti Partai Golkar, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (sudah puluhan tahun), ada pula baru beberapa tahun seperti Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang dan sebagainya. Juga ada partai benar-benar baru seperti Partai Hati Nurani (disingkat Hanura), Gerakan Indonesia Raya (disingkat Gerindra) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (disingkat PPI atau P3I) serta partai-partai lainnya yang baru saja lolos dari verifikasi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bulan Februari 2008 dan lolos verifikasi faktual bulan Mei sampai dengan Juli 2008. Untuk pesta demokrasi tanggal 9 April 2009 yang akan datang sejumlah 44 partai akan melakukan ajang pemilihan legislatif mulai tingkat dua atau kabupaten dan kota, tingkat satu atau provinsi

sampai dengan tingkat pusat Dewan Pertimbangan Rakyat Republik Indonesia (calon legislatif).

Berkenaan dengan maraknya partai yang akan bertarung dalam pesta demokrasi guna menempatkan calon legislatifnya di parlemen tingkat pusat, tingkat provinsi dan kabupaten serta kota masing-masing. Masyarakat dihadapkan oleh pilihan yang relatif sulit karena terlalu banyak partai yang lolos verifikasi. Meskipun jumlah partai yang banyak itu menghiasi ranah politik negeri ini, akan tetapi masyarakat sudah dewasa mencermatinya. Khususnya di Kota Mataram warganya cenderung memilih partai yang berorientasi keagamaan dan bersifat nasionalistik. Ketika dilakukan wawancara terhadap tokoh sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Partai Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPD I NTB) Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) – (partai baru yang mengikuti pemilu tahun 2009), dikatakannya bahwa masyarakat NTB khususnya di Kota Mataram masih menghormati nilai-nilai kultural bersama simbol yang melekat padanya.

Juga peran serta agama masih menjadi dominan, terlihat pada saat pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat bulan Juli 2008. Bukan kalangan birokrat yang menjadi pemenangnya, melainkan dari golongan tuan guru alias ulama yang bernama “Tuan Guru Bajang” dengan nama lengkap “Zainul Majdi”. Terpilihnya Tuan Guru Bajang ini merupakan simbol keagamaan yang masih kuat melekat pada eksistensi sang tokoh. Juga tidak terlepas dari latar belakang sang kakek “Tuan Guru” (Zaenuddin) pendiri pondok Pesantren “Nahdlatul Wathan”. Kharisma Tuan Guru merambah ke pelosok desa, hal itu disebabkan oleh jasanya mendirikan sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi di Pulau Lombok dan Sumbawa.

Penghormatan masyarakat terhadap “Tuan Guru” tentu memiliki nuansa dan kriteria tersendiri, hal yang dimaksud adalah; kearifan dan kebijaksanaan, kejujuran dan ketulusan sehingga mengkristal pada wujud bersifat absolut dalam manifestasi kewibawaan sang Tuan Guru. Dari sikap santunnya sang tokoh

terjelma menjadi “kharismatik”. Di mata masyarakat sang tokoh yang disebut “Tuan Guru” hampir tidak mempunyai cacat, bahkan sebaliknya dia disanjung, dipuja dan lain bentuk pujian. Malahan ada sekelompok warga mengkultuskan dan memberinya predikat “waliullah” (utusan Allah untuk melanjutkan risalah Rasulullah SAW dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* di muka bumi ini).

Terpilihnya Tuan Guru Bajang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan penuturan informan bahwa, sangat baik dipimpin oleh seorang ulama, namun masih dipertanyakan dari berbagai kalangan akan kapabilitas sebagai umara' atau pemimpin pemerintahan. Bisa jadi sedikit mengalami perubahan pelaksanaan memimpin karena amat jelas perbedaan antara menghadapi birokrasi dengan sejumlah perangkat dan pendukung yang menyertainya dengan massa yang hanya diberi wejangan bersifat kerohanian. Perubahan sikap memimpin tentu berdampak psikologis dan politis, disebabkan oleh nuansa pemerintahan yang mempunyai aturan birokrasi yang baku serta mapan sehingga memerlukan gaya kepemimpinan tersendiri dan kemampuan untuk menyikapinya. Hal tersebut disangsikan oleh informan atas gaya dan tindakan mengambil kebijaksanaan terhadap persoalan yang ada dalam tubuh pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ditambahkan pula bahwa Tuan Guru harus banyak mendengar dan mencermati keluh kesah para karyawan dan staf kantor gubernur, juga mempelajari kebijakan yang telah diambil oleh gubernur sebelumnya. Dengan sendirinya diperlukan banyak pertanyaan dari pelaku pemerintahan terkait.

Informan lain yang aktivitas sehari-hari sebagai dosen pada salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram menuturkan bahwa setelah Tuan Guru diumumkan pemenang sebagai Gubernur Nusa Tenggara Barat, di kantor gubernuran mulai terjadi pengelompokan yang menggunakan pola ikatan primordialisme kesukuan dan keagamaan. Hal ini tentu membias pada sendi-sendi pengaturan siapa bakal jadi kepala biro dan kepala bagian serta kepala seksi. Oleh karena penelitian ini berlangsung dua minggu sesudah pemilihan



Kepala Daerah Tingkat satu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dua minggu sebelum pelantikan, maka data mengenai benar atau kurang tepatnya sinyalemen ikatan primordial kesukuan dan keagamaan tidak diperoleh secara akurat. Untuk ini informan tersebut hanya melihat seabagai wacana (diskursus = *discourse*). Meskipun disinyalir sebagai diskursus ataupun wacana, tetapi kecenderungan untuk menjurus ke arah tersebut amat memungkinkan karena telah banyak contoh konkrit terjadi selama ini. Lihat saja pada strata pemerintahan pusat hingga pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten dan kota serta kecamatan.

Pola semacam itu dapat divonis sebagai tindakan diskriminatif dan jauh bergeser dari sikap kenasionalan dan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an. Kemudian mau dikemanakan adanya kemajemukan dalam masyarakat Mataram khususnya yang menjadi karyawan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat? Pola seperti itu yang mendominasi ikatan primordialis kesukuan dan keagamaan menjadi hambatan utama dinamika perkembangan demokrasi di tanah air tercinta ini.

Kemudian mengacu pada kebiasaan masyarakat kota Mataram yang berkenaan dengan simbol budaya, umumnya warga setempat tetap menghormati dan melaksanakan aturan kaidah yang berlaku, baik dengan pola keagamaan berdasarkan keyakinan masing-masing maupun secara normatif berlaku umum. Dalam kegiatan sehari-hari mereka, aturan dan kaidah yang maksud adalah menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya seperti pada bulan suci Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bulan Rajab (memperingati Isra' Mi'raj), bulan Maulid diperingati Kelahiran Nabi dan Rasul terakhir serta tahun baru Islam bulan Muharam. Juga bagi Kaum Nasrani memperingatinya seperti hari Natal dan tahun baru, hari agung kenaikan Nabi Isa Al-Masih (Nabi Isa Alaihissalam). Begitu pula warga yang beragama Hindu acapkali melakukan ritual berdasarkan hari perhitungan mereka seperti Galungan dan lain sebagainya.

Para pendukung masing-masing umat beragama tidak ada yang nampak persaingan dan perselisihan, melainkan adanya kerukunan umat beragama yang tata tenteram dan bersahabat. Kedamaian ini tercipta dengan kuatnya dan tingginya kesadaran menjalankan agama masing-masing. Kesadaran tersebut dimaknai secara simbolistik bahwa mendekatkan diri kepada Maha Pencipta merupakan pengejawantahan transendental pribadi atau individu masing-masing. Manusia sebagai makhluk dicipta dari Sang Pencipta, boleh melakukan penilaian atas diri sendiri, tetapi menyangkut individu lain sudah merupakan penilaian tersendiri dan mutlak dari Sang Khaliq.

Berdasarkan penilaian sebahagian masyarakat khususnya kalangan intelektual tentang maraknya partai politik yang siap mengikuti pesta demokrasi bulan April 2009, hanya merupakan keinginan serta penonjolan individu untuk tampil sebagai salah satu pemimpin guna melegitimasi diri sebagai seorang figur di mata para pendukung masing-masing partai. Dengan demikian berarti hanya mempopulerkan diri melalui partainya dan kelak maju ke putaran berikutnya. Keinginan secara personal ini mengindikasikan dirinya sebagai seorang sosok merasa mampu untuk memimpin dalam takaran regional ataupun nasional. Pola pemikiran seperti itu membuat banyak partai bermunculan dan menklaim akan kemampuan memenangkan diri pada pemilihan umum mendatang. Di tahun 2004 silam jumlah partai politik mengikuti ajang pemilihan umum sejumlah 24 partai, akan tetapi tahun 2009 mendatang ini akan berjumlah 44 partai termasuk didalamnya 6 (enam) partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Kecenderungan yang kuat dalam tubuh partai masing-masing seakan didominasi sikap ambisi para pengurus pada tingkat Dewan Pengurus Pusat (disingkat DPP), Dewan Pertimbangan Daerah Tingkat Provinsi (disingkat DPD I) sampai ke tingkat Kabupaten. Bahkan pada tingkat akar rumput (padahal banyak partai yang mengklaim lapisan bawah ini sebagai basis dan anggotanya). Untuk membuktikan akan pengaruh seorang pemimpin atau *leader*, terlihat pada bulan April 2009. Apakah benar seorang

figur atau pemimpin akan teruji pada ajang pesta demokrasi mendatang. Banyak sudah yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin, akan tetapi selesai pesta demokrasi mereka pada berguguran dan amat terbatas yang memilihnya disaat pemilihan legislatif ataupun presiden. Di tingkat provinsi dan kabupaten, juga seperti itu yakni berjatuhan dan masyarakat tidak memilihnya. Begitu pula di level kecamatan dan desa, mereka dalam hal ini tokoh formal menganggap dirinya dialah figur yang tepat untuk menjadi kepala kecamatan atau pak lurah atau kepala desa, ternyata masyarakat memilih yang mereka anggap pantas untuk jabatan tersebut (kepala kecamatan, lurah dan kepala desa).

Kecenderungan masyarakat khususnya di Kota Mataram memilih pemimpin formal seperti Gubernur dan Walikota dari kalangan tokoh informal (*informal leader*), disebabkan oleh berbagai pertimbangan seperti dilihat dari aspek moral, agar kelak jadi pejabat tidak melakukan hal-hal yang merugikan negara dan masyarakat yakni menghindari korupsi. Juga aspek kultural dipertimbangkan dan dilihat dari latar belakang keluarga sang pemimpin. Maka Tuan Guru Bajang yang menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Apabila sang pemimpin dalam hal ini Gubernur NTB terpilih menjalankan tugasnya selama lima tahun ke depan kurang disenangi masyarakat NTB, maka hanya satu periode saja mempunyai kesempatan menjadi Gubernur NTB, akan tetapi jika beliau (Tuan Guru Bajang) berhasil meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat NTB dari segala aspek, maka dia mempunyai peluang untuk memimpin dua periode melalui pemilihan Kepala Daerah Tingkat satu NTB tahun 2013.

Berdasarkan pengamatan informan tentang kapabilitas memimpin Nusa Tenggara Barat (dalam hal ini Tuan Guru Bajang), sedikit merasa kurang "perfect" karena beliau berlatar belakang ilmu santrian melalui pesantren, sementara pengelolaan pemerintahan harus secara profesional kebirokrasian yang mengacu pada aturan dan tatanan manajerial. Juga harus memiliki cakrawala pandang dalam bentuk administratif pemerintahan. Disinilah sedikit menjadi distorsi

karena perbedaan persepsi dalam cara pengelolaan pemerintahan. Sinyalemen ini nampaknya beberapa kalangan intelektual dari kampus melihat hal yang sama. Namun dalam takaran tersebut diduga kurang profesional, akan tetapi ditunggu pada perjalanan dan penerapan pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan di kantor Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat hingga akhir periode pemerintahannya.

Hal yang terabaikan dari penilaian informan tersebut atas diri sang Pemimpin adalah bahwa Tuan Guru Bajang masih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat Pusat (DPR RI). Sedikit atau tak terhitung pengalaman yang ada dalam diri beliau dan kemungkinan melalui lembaga legislatif itu banyak memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan jabatan yang diembannya sekarang ini.

Pengalaman dan hasil evaluasinya dalam kancah pengejawantahan jabatan memungkinkan sekali berlaku simbiosis mutualistik atau saling melengkapi dan bersinergi. Juga literatur ikut serta memberi kontribusi dalam pengembangan intelektualitas sang pemimpin. Dari banyaknya referensi yang telah ditelaah dan naskah serta teks dapat memperluas cakrawala pandang dan pikirannya guna menjalankan dan mengemban amanah. uga ditopang oleh kematangan pada pondok pesantren yang diawali dari sekolah taman kanak-kanak sampai ke jenjang perguruan tinggi. Perjalanan menapaki karier dan hasil usaha menimba ilmu baik dari ajaran agama Islam maupun dari ilmu pengetahuan secara umum.

Diperkaya pula dengan sejumlah pengalaman di Jakarta dan di Timur Tengah khususnya di Saudi Arabia yang relatif lama menimba ilmu agama. Kesemuanya itu merupakan akumulasi penumpukan ilmu dan pengalaman yang dapat dimanifestasikan dalam pemerintahan yang diembannya sekarang ini.

### **2.3.4. Kontribusi Nahdlatul Wathan**

Sebelum menjelaskan peranan dan kontribusi organisasi Nahdlatul Wathan terhadap pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu diketahui secara mendalam organisasi tersebut.

Nahdlatul Wathan asalnya dari dua kata Arab, yakni; “Nahdlah” dan “Al Wathan”. Kata Nahdlah yang berarti kebangkitan, pergerakan dan pembangunan, Al Wathan berarti tanah air atau negara. Jadi Nahdlatul Wathan bermakna kebangkitan tanah air, pembangunan negara atau membangun negara (Nahdlatul Wathan, 1988).

Organisasi Nahdlatul Wathan sebenarnya penganut Fahaman Ahlussunnah Wal Jama’ah yang dikenal dari Mazhab As – Syafi’i. Sebelum dilaksanakan Mukhtamar Nahdlatul Wathan (disingkat NW) ke-8 pada tahun 1986, ia berasaskan Islam Ahlussunna Wal Jama’ah dan bertujuan “*li I’lai’I kalimatillah wa izzil Islam wal Muslimin*” dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia *wal akhirat*, sesuai dengan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah ala Mazhabil Imamisy Syafi’i Radiyallahu ‘anhu. Nahdlatul Wathan sebagai organisasi Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, memusatkan aktivitasnya dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiah.

Pendiri Nahdlatul Wathan (NW) adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, didirikan di Pancor Lombok Timur Nusa Tenggara Barat pada tanggal 22 Agustus 1953 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 H. NW itu berpedoman pada bidang aqidah dan dalam bidang fiqih. Pada bidang aqidah Nahdlatul Wathan menganut hasil ijtihad dari Imam Abdul Hasan Al Asy’ari dan Imam Abu Manshur Al Maturidi. Sedangkan dalam bidang fiqih atau hukum Islam, Nahdlatul Wathan mengikuti hasil ijtihad Imam Syafi’i radliyallahu ‘anhu atau ber Mazhab Syafi’i. (Nahdlatul Wathan, organisasi pendidikan, sosial dan dakwah Islamiah, 83-85.1988).

Keberadaan dan kesuksesan Nahdlatul Wathan sekarang diilhami oleh kembalinya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Tanah Suci Makkah dan menyelesaikan studi di Madrasah Ash Shaulatiyah. Pesantren itulah yang menjadi inspirasi dan motivasi sehingga berdiri dan lahirnya “Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah” disingkat NWDI. Sebelum lahir NWDI ini terlebih dahulu Tuan Guru mendirikan pesantren Al

Mujahidin pada tahun 1934 M di kampung Bermi Pancor (kampung tempat Tuan Guru di lahirkan di Pulau Lombok).

Tuan Guru mendirikan pesantren dilandasi oleh keterbelakangan masyarakat muslim Lombok yang belum mengerti peradaban yang sejati disebabkan pendidikan agama sangat minim dan Sekolah Rakyat (SR) hanya orang tertentu saja menikmati. Hal itu dikarenakan oleh penindasan kolonial Belanda serta lamanya kerajaan Hindu Bali bercokol di Pulau Lombok dan dikenal pula dengan sebutan Pulau Selaparang (NWDI, 1988). Dalam rentang waktu relatif singkat pesantren tersebut dihuni oleh sejumlah 200 santri dan santriwati dan *mondok* di halaman serta di serambi rumah penduduk setempat dekat pesantren. Perjalanan hidup dan tumbuh kembangnya madrasah ini diwarnai oleh berbagai ragam fitnah dan hujatan dari kalangan penguasa jaman kolonial Belanda dan tokoh masyarakat yang khawatir kehilangan wibawa. Pokok ajaran yang diterapkan oleh Tuan Guru di Madrasah itu diisukan sebagai aliran sesat yang berorientasi dari penganut aliran "*Khawarij, Mu'tazilah*" yang tidak ber-mazhab dan digembar gemborkan sebagai pengikut "*Wahabi*" dar Makkah Al Mukarramah.

Dampak dari fitnah itu sebagian besar dari wali santri menarik kembali anak-anaknya sehingga yang tersisa mengikuti pendidikan di Madrasah tersebut hanya berkisar 50 santri. Demikian pula warga yang mewakafkan tanahnya untuk rencana pembangunan madrasah sebagai kelanjutan pesantren Al Muja-hidin, secara mendadak mereka mencabut alias mengambil kembali tanah wakafnya. Akibat dari tantangan itu, justru Tuan Guru semakin gigih dan bersemangat mendirikan pondok pesantren yang diberi nama "*Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah*" (NWDI) berdiri di atas tanah wakaf dari H. Muhammad Syazali. Madrasah inilah sebagai embrionya seluruh Madrasah Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat.

Dari tahun 1934 berdirinya madrasah tersebut (NWDI), tujuh tahun kemudian (tahun 1941) memiliki lulusan pertama dan lulusan kedua pada tahun 1949. Para alumni ada yang melanjutkan studi ke

jenjang yang lebih tinggi dan ada yang pulang kampung mengembangkan pendidikan serta mendirikan madrasah cabang Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah. Aktivitas para alumnus pertama dan kedua melahirkan 24 madrasah yang terdiri dari 19 madrasah diperuntukan bagi santri atau laki-laki dan 5 madrasah untuk santriawati atau perempuan. Hingga tahun 1953 berkembang dan bertambah sehingga mencapai 66 Madrasah yang tersebar di seluruh pelosok desa di Nusa Tenggara Barat (ibid.1988).

Dari perjalanan panjangnya Madrasah Nahdlatul Wathan dan tumbuh kembangnya dengan baik, maka para pendiri dan pendidik sadar akan perlunya manajemen yang baik sehingga membutuhkan organisasi yang mampu memanagerialkan segala upaya dan usaha yang produktif, maka lahirlah organisasi Nahdlatul Wathan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 H yang bertepatan tanggal 1 Maret 1953 M. Organisasi ini dijadikan sebagai koordinasi, pembinaan, pemelihara serta penanggung jawab terhadap segala hal ikhwal yang berkenaan dengan amal usaha yang dilakukan baik dalam bidang pendidikan maupun sosial dan dakwah.

Bahkan di luar Nusa Tenggara Barat, Nahdlatul Wathan telah mempunyai cabang organisasi di Bali (tahun 1960), Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya. Sebagai bukti adanya aktivitas dan eksistensi Nahdlatul Wathan ini, telah delapan (8) kali menyelenggarakan muktamar sejak berdirinya organisasi tersebut. Juga beberapa kali melaksanakan konferensi pada tingkat cabang dan rapat pada tingkat daerah atau wilayah termasuk perwakilan (Lihat NW, 99).

Keberadaan Nahdlatul Wathan selama rentang waktu 74 tahun ini (dari tahun 1934-2008 saat penelitian ini dilakukan) secara kultural yang sifatnya agamis amat sangat memberi makna, nuansa dan warna tersendiri bagi wilayah Nusa Tenggara Barat. Maka Tidak mengherankan secara kultural memberikan simbol yang muatannya sarat dengan nilai agama khususnya Islam dalam arena dan kancah peradaban masyarakat setempat. Peranan Tokoh masyarakat yang

mereka sebut tuan guru (ulama) mencerminkan betapa kuatnya ikatan primordialistik dan keagamaan serta menjadikan daya dukung pada tingkat dan level yang tinggi secara optimal. Salah satu contoh konkrit kuatnya dukungan tersebut adalah terpilihnya seorang Tuan Guru yang masih merupakan cucu dari Tuan Guru pendiri Madrasah Nahdlatul Wathan ini menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat saat dilaksanakan pemilihan kepala daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bulan Juli dan dilantik pada pertengahan September 2008 silam.

Berbagai tanggapan bermunculan setelah selesai pemilihan dan dinyatakan pemenangnya adalah Tuan Guru Bajang (Zainul Majdi). Berdasarkan keterangan informan bahwa Kemenangan Tuan Guru Bajang dikarenakan masyarakat Nusa Tenggara Barat membutuhkan pemimpinnya figur yang bersih, jujur dan amanah. Predikat yang melekat pada kata “Tuan Guru” atau ulama itu menjadikan “*trade mark*” (jaminan mutu) kebersihan dan kearifan melekat dalam nama Tuan Guru tersebut. Atas dasar jaminan mutu tersebut masyarakat setempat menjadikannya tumpuan harapan akan tercapainya “pemimpin yang bersih dan berwibawa” sehingga wilayah Nusa Tenggara Barat kelak menjadi kawasan yang bersih dari perbuatan tercela seperti korupsi dan bentuk manipulasi lainnya demi untuk kepentingan individu atau kelompoknya.

Informan yang kebetulan satu ikatan primordial kesukuan dan agama mengungkapkan hal yang berkenaan dengan terpilihnya seorang figur seperti Tuan Guru yang dipilih memiliki beban moral yang amat berat. Selain mengemban amanah di dunia fana ini, juga kelak akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Jadi persoalan yang dianggap amat krusial dalam memimpin di provinsi ini karena seorang ulama atau tuan guru yang berlatar belakang agama, kemudian akan menjalankan tugas rutinitasnya sehari-hari pada bidang administratif, maka akan mengalami kendala dalam melaksanakan tugas yang sifatnya birokrasi itu. Oleh sebab itu secara obyektif dapat dikatakan bahwa ilmu yang ada pada tuan guru yang berlatar belakang agama dengan pengejawantahan pada pekerjaan di birokrasi, nampaknya tidak sinkron dan proporsional. Dengan



demikian perlu dicermati lebih lanjut agar tidak terjadi bias dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, diperlukan staf dan karyawan yang representatif dan menemuknenali pekerjaan masing-masing. Kecermatan inilah diharapkan akan kemampuan sang pemimpin seperti Tuan Guru Bajang dalam memimpin Nusa Tenggara Barat ke depan.

Informan yang satu ini justru melihat dari sudut pandang lain atas terpilihnya gubernur dari kalangan Tuan Guru. Dikhawatirkan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas sehari-hari, karena dalam istilah “*the right man on the right place*” tidak memenuhi makna tersebut. Alasan kekhawatiran sebab pekerjaan yang akan dihadapi umumnya dalam bentuk administratif dan birokrasi membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang sifatnya “*cognitive*” (secara sadar benar).

Berdasarkan analisa penulis bahwa seorang pemimpin yang kharismatik, dengan sendirinya sarat akan muatan dan perangkat yang menyertainya guna mengejawantahkan pola pikir dan hasil renungan yang dituntun oleh hati nurani secara arif dan bijak. Seseorang yang menekuni bidang agama khususnya Islam (dari hasil diskusi pada ulama) acapkali seorang ulama ataupun tuan guru (*Gurutta* sebutan di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat) bila hendak melakukan pekerjaan demi umat, terlebih dahulu melakukan internalisasi individual terhadap Tuhannya atau dengan kata lain, mereka melakukan Sholat Sunnah (melakukan transendental) sebelum melaksanakan tugas rutinitasnya. Hasil dari perenungannya sering intuisinya menuntun untuk melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dia dituntun dan dipandu oleh Sang Haliq (Allah Azzawajalla) sehingga kecil kemungkinan akan terjadinya penyimpangan ataupun bias-bias yang lain. Melaksanakan tugas rutinitas sehari-hari secara proporsional pula dia menggunakan pisau analisa “kata hati yang dikawinkan dengan pemikiran yang jernih”. Perpaduan unsur hati nurani dengan akal sehat secara optimal hanya dapat dimiliki seseorang manakala tingkat kekhusu’annya digunakan secara optimal pula. Hal inilah yang dimiliki oleh seorang ulama atau tuan guru. Juga

merupakan keistimewaan yang diperoleh dari Allah Subhanahu Wataala.

## 2.4. Penutup

Penelitian di Kota Mataram yang dilakukan pada bulan Agustus 2008 baru-baru ini, dengan pokok perhatian pada pemaknaan budaya setempat dan peranan seorang Tuan Guru yang menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Juga dilihat pengaruh dan perubahan pola budaya masyarakat setempat atas marak dan banyaknya Partai Politik yang akan bertarung memperebutkan kursi di Legislatif yang dimulai di kabupaten dan kota, provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat pusat. Dari 38 partai politik yang ada di wilayah tersebut, nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya. Terlihat di berbagai pelosok Kota Mataram maraknya simbol yang bersendikan agama seperti halnya bentuk rumah seseorang yang beragama Hindu, terlihat pada salah satu sudut rumah ada tampak tempat meletakkan sesajen sebagai bentuk ejawantah ritual berdasarkan keyakinan masing-masing. Juga bentuk rumah dan pagar yang memiliki kekhasan berdasarkan si pemilik. Di kalangan yang beragama Islam ada kekhasan yang amat menonjol, seperti Masjid yang tersebar di desa dan khusus di wilayah Ampenan dan sekitarnya amat berdekatan dari satu masjid dengan masjid lainnya sehingga memudahkan para penganut agama Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu. Tidak mengalami kelelahan untuk datang ke masjid karena dekat dengan rumah mereka masing-masing. Kemudahan itu dikarenakan warganya secara bersama-sama melakukan pembangunan di bidang spiritual dan bergotong royong membangun masjid sehingga tidak mengherankan jika dijumpai ada rumah yang bentuk bangunannya amat sederhana di samping masjid yang megah.

Simbol masjid bagi masyarakat setempat mencerminkan jati diri sebagai muslim yang patuh menjalankan syariat berdasarkan keyakinannya. Juga ada kebanggaan tersendiri jika membangun satu unit masjid di suatu lingkungan (rukun warga) memaknai bahwa warga setempat sudah berada pada taraf tingkat kesejahteraan yang

mapan (*survival*). Memang benar adanya, bahwa kebanyakan warga yang membangun masjid sebagian besar dari hasil usaha dari rantau seperti sebagai tenaga kerja Indonesia baik perempuan maupun laki-laki. Sebagian pula sebagai pedagang emas, berlian, mutiara dan sejenisnya. Pedagang tersebut kebanyakan keluarganya pernah merantau mencari rezeki di Timur Tengah, Malaysia, dan negara lainnya.

Kemudian dilihat dari hal upacara keagamaan khususnya umat Islam seperti hari raya Idul Fitri, mereka melakukan secara bersama-sama di masjid-masjid atau di lapangan, sebelumnya mereka berpuasa sebulan penuh dan sholat tarawih bersama-sama di masjid dan surau yang ada di Kota Mataram. Juga peringatan Is'ra' Mi'raj, pemerintah setempat mensponsori terselenggaranya acara tersebut, begitu pula peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah setempat mendukungnya sehingga terselenggara acara tersebut.

Kuat dugaan dan alasan kelak pemerintah yang sekarang Gubernurnya dari golongan santri atau Ulama yakni Tuan Guru Bajang akan lebih menyemarakkan lagi upacara-upacara keagamaan karena memang beliau berlatar belakang agama sehingga pada masa silam sebelum menjadi gubernur hal-hal yang belum pernah ataupun pernah diangkat ke permukaan dalam hal ini ritual secara Islami, akan diangkat secara luas hingga ke pelosok desa yang ada madrasah Nahdlatul Wathannya.

Dengan demikian dapat ditelaah akan makna simbolistik yang kelak diusung oleh pemerintahan yang baru itu dengan latar belakang santri atau ulama. Tuan Guru sebagai simbol agama sekaligus perangkat budaya melekat di dalamnya. Sejumlah perangkat melekat dalam diri seorang panutan, secara bersamaan pula predikat adanya indikator kejujuran, keikhlasan, ketulusan, kearifan menjadi bagian kehidupan sang tokoh dan itulah pemimpin yang "kharismatik" berwibawa serta disegani oleh masyarakat pendukungnya.

## Daftar Pustaka

- Buchari, BM, 2005, "Agama dan Adat" dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: PMB-LIPI.
- Budiwanti, Erni, 2005. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS.
- Lalu Wiradjuna, 1984, *Peranan Ulama (Tuan Guru) dalam Pembangunan "Nahdlatul Wathan"*. Organisasi Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Mataram: Unram Press.
- , 1988, *Da'wah Islamiyah*. Fak. Hukum Universitas Mataram.
- Shihab, M.Quraish, 2003. "Tafsir Al-Mishbah" Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an.
- Imam Nawawi, 2006, "Riyadhus Shalihin". Jakarta: Al-Ikhtishom Cahaya Umat.

---

---

## **BAB III**

---

---

# **WACANA POLITIK KEBUDAYAAN DI MATARAM PADA ERA GLOBALISASI**

Oleh Endang Retnowati

### **3.1. Pengantar**

**P**rovinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang berpotensi menjadi daerah pariwisata karena memiliki sumberdaya alam beserta keindahannya dalam jumlah banyak. Hingga kini masih banyak para wisatawan, baik wisatawan asing mau pun domestik, yang berkunjung di sana. Mereka tentu menyebabkan perubahan budaya terjadi di NTB.

Ada hal positif dan negatif berkaitan dengan perubahan budaya dan ekonomi di sana. Wujud positif dari perubahan itu misalnya pendapatan daerah meningkat, produk kerajinan daerah hidup. Sedangkan wujud negatif dari perubahan itu misalnya penipisan nilai moral masyarakat karena gaya hidup hedonis, semakin terdesaknya komunitas ekonomi lemah oleh kekuatan modal asing seperti plaza, KFC, dan sebagainya.

Hingga kini masyarakat NTB masih beruntung di alam globalisasi ini karena budaya tradisional mereka relatif masih terpelihara misalnya nilai kekerabatan. Seberapa jauh fenomena kebudayaan tradisional tercermin dalam kehidupan masyarakat Mataram khususnya dan Lombok pada umumnya di masa kini?

### **3.2. Kebudayaan Tradisional**

Kata kebudayaan memiliki banyak arti. Tulisan ini memakai definisi kebudayaan dari C.A. van Peursen. Menurut van Peursen kebudayaan adalah manifestasi kehidupan setiap orang dan sekelompok orang, berlainan dengan hewan-hewan, yang meliputi segala perbuatan manusia, seperti cara menghayati kematian, cara

mengolah makanan, cara bersopan santun waktu makan, cara membuat alat-alat atau berburu, tradisi (pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, harta benda), kesenian, ilmu pengetahuan dan sebagainya.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud tradisi di sini adalah adat istiadat, ritus-ritus, ajaran-ajaran moral, pandangan-pandangan, nilai-nilai, aturan-aturan perilaku, dan sebagainya, yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>2</sup> Atas dasar kedua pengertian istilah tersebut, ada dua pemahaman yang diturunkan, yaitu pertama, bahwa pengertian kebudayaan tradisional selalu berkaitan dengan pandangan dunia yang terkait dengan pandangan hidup masyarakat warisan generasi sebelumnya. Seperti halnya dalam pengungkapan peradaban dunia, setiap kebudayaan mengungkapkan pandangan hidup yang berorientasi pada kekuatan alam, seperti pada gunung-gunung, danau, pohon besar, dan lain sebagainya. Ketika mereka mengungkapkan kebudayaan seperti tersebut posisi mereka berada dalam tahap kebudayaan pra modern. Sedangkan dalam kebudayaan modern manusia sudah memisahkan subyek dengan alam sehingga alam menjadi obyek untuk dimanipulasi, dimanfaatkan semaksimal mungkin demi pemenuhan kebutuhan manusia.

Pengertian kebudayaan tradisional seperti digambarkan di atas bisa disejajarkan dengan pengertian kebudayaan pra modern. Artinya kebudayaan tradisional dipahami sebagai kebudayaan pra modern. Dalam kebudayaan pra modern manusia belum memisahkan subyek (manusia) dengan obyek (alam). Kebudayaan pra modern merupakan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat pra modern. Masyarakat pra modern adalah masyarakat yang belum memisahkan alam batiniah dari alam lahiriah. Pengertian kebudayaan pra modern tidak berbeda dengan pengertian kebudayaan mitis dari C.A. van Peursen.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 10-11.

<sup>2</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal. 115-116.

<sup>3</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, hal. 34-42.

Menurut van Peursen kebudayaan mitis memiliki beberapa ciri, antara lain adalah bahwa dalam kebudayaan mitis manusia sebagai subyek dan alam lingkungan sebagai obyek masih dinilai sebagai kesatuan. Artinya manusia belum bisa melepaskan diri dari alam lingkungan, masih dalam lingkup alam, lingkungan alam menjadi ancaman bagi subyek. Lingkungan alam merupakan obyek yang memiliki nilai sakral dan nilai profan sehingga menjadi tempat bersemayam kekuatan gaib. Kekuatan gaib menjadi orientasi dan proyeksi bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya sehingga manusia memiliki ketergantungan pada kekuatan gaib untuk meraih keselamatan hidup dan menghindarkan petaka dari kehidupannya. Itu dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan kekuatan gaib melalui seremonial. Misalnya manusia ingin meminta hujan atau menangkal penyakit melalui pementasan tari-tarian beserta ritual-ritualnya. Alam lingkungan juga memberi pengetahuan kepada manusia, seperti siang malam, pergantian musim, pasang surutnya laut, sehingga waktu adalah sebagai daur ulang yang secara terus menerus berulang. Alam lingkungan yang profan dan sakral memberi masyarakat suatu aturan sebagai warisan norma dari leluhur mereka sehingga menjadi etika teonom yang datang dari dewa-dewa. Berbekal etika teonom masyarakat mengandalkan kekuatan untuk tidak berbuat yang menyimpang dari norma. Kondisi demikian menyebabkan pribadi seseorang lebih melebur ke dalam masyarakat, lalu identitas melebur pada kelompok.

Kebudayaan tradisional sebagaimana digambarkan di atas masih bisa dijumpai di NTB meski pun pada umumnya yang masih memelihara kebudayaan tradisional adalah mereka yang menganut agama Islam. Itu semua bisa dinilai positif karena kebudayaan tradisional adalah semacam pedoman di mana mereka belajar, memahami dan memelihara nilai dan norma, mengembangkan dirinya dalam hidup bermasyarakat, berorientasi pada kebudayaan tradisional itu.

Dalam kenyataan kebudayaan tradisional selalu berhadapan dengan kebudayaan modern. Dalam kebudayaan modern manusia

sudah memisahkan subyek dengan alam sehingga alam menjadi obyek untuk dimanipulasi, dimanfaatkan semaksimal mungkin demi pemenuhan kebutuhan manusia. Akan tetapi bencana alam terjadi beriringan dengan perkembangan kebudayaan modern, misalnya bencana banjir yang disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam demi kepentingan bisnis. Usaha bisnis yang berkembang sebagai sistem ekonomi kapitalis selalu mengejar untung sehingga di alam kapitalisme hubungan antar manusia membentuk hubungan seperti hubungan dalam bisnis.

Kekuatan kebudayaan tradisional sebenarnya mampu menghadapi sisi negatif dari kebudayaan modern yang berpotensi menghancurkan solidaritas yang dibina lewat tradisi-tradisi yang bersumber pada agama atau religi.

### **3.3. Pewarisan Nilai dan Norma**

Pewarisan norma dan nilai bisa dilakukan melalui tradisi mau pun melalui lembaga pendidikan, instansi terkait. Pewarisan melalui tradisi tercermin dalam upacara-upacara adat, sedangkan pewarisan melalui lembaga pendidikan atau instansi terkait tercermin dalam kurikulum sekolah, dalam pameran-pameran atau pertunjukan kesenian tradisional secara berkala. Pewarisan melalui tradisi tentu terkait dengan isi tradisi berupa pandangan hidup masyarakat.

Pandangan hidup masyarakat tradisional pada umumnya diwarnai oleh pandangan mengenai kekuatan gaib atau roh, yang mengatasi manusia dan alam lingkungan di mana manusia mengalami proses kehidupan atau oleh agama. Maka kita banyak menjumpai nama zat yang berpengaruh pada kehidupan manusia menurut religi mereka misalnya kekuatan gaib atau roh. Kata lain dari kekuatan gaib atau roh adalah *Ada*.

Ada sebagai zat yang tidak bisa dilihat, bisa memiliki personifikasi yang berbeda-beda, misalnya sebagai roh nenek moyang, roh penunggu desa, dan sebagainya, yang semuanya berpengaruh kepada kehidupan manusia. Hal demikian bisa dilihat



dalam realitas budaya masyarakat dari berbagai bagian dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan oleh Erni Budiwanti bahwa orang Bayan, yang hidup di Nusa Tenggara Barat, memiliki keyakinan mengenai keesaan Tuhan atas dasar agama Islam dan kepercayaan kepada roh dalam kerangka kosmologi Bayan yang menurunkan religi Bayan. Religi Bayan meyakini bahwa manusia adalah sebagai komponen mikrokosmos yang memiliki kedudukan istimewa di antara makhluk lain dan secara alami melewati rangkaian siklus dalam tiga tahap, yaitu dilahirkan, menjalani kehidupan dan meninggal dunia. Sebagian besar ritual di Bayan dilakukan disekitar siklus tersebut dan senantiasa dilakukan di setiap perpindahan dari satu tahap ke tahap lainnya di mana peran dan status seseorang berubah. Ritual lain dari bagian kehidupan sosial budaya juga dipraktikkan di sekitar siklus pertanian, mulai dari menanam benih hingga memanen. Rangkaian ritual juga merupakan wujud pengabdian dan komitmen terhadap dunia roh. Meskipun mereka beragama Islam tetapi mereka masih menghargai peran dunia roh ketika menyelenggarakan ritus-ritus menurut aturan dalam kebiasaan mereka sesuai dengan penanggalan Islam.<sup>4</sup>

Fenomena serupa masih banyak dijumpai di desa-desa yang terletak di wilayah NTB. Fenomena yang mencerminkan masih kuatnya kebudayaan tradisional NTB adalah fenomena bangunan rumah dan aktivitas masyarakat dusun tradisional Senaru, kecamatan Bayan.<sup>5</sup> Rumah adat tersebut disebut Rumah Adat Senaru, memiliki bagian-bagian yang setiap bagian memiliki fungsi sendiri-sendiri. Bagi masyarakat di sana fungsi bagian-bagian memuat ajaran atau norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat ketika berhadapan dengan kegiatan dalam perayaan dan upacara tertentu. Di samping itu

---

<sup>4</sup> Masyarakat Indonesia, 2004, 31-3

<sup>5</sup> Erni, *Kajian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Sasak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat*, Lombok: Program Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, 2005, hal. 26-36.

masyarakat Senaru juga memiliki adat yang mencerminkan keberlakuan atau pewarisan norma-norma adat di sana.

Bagian-bagian rumah adat senaru beserta bentuk adat lainnya adalah sebagai berikut:

Pertama adalah Inan (induk rumah). Bangunan itu dipakai untuk memanjatkan doa yang dipimpin oleh anggota keluarga tertua dan mangku pada *bale lahaq* (Rumah Tua).

Kedua adalah *amben beleg*, sebagai tempat *mengageq*. Fungsinya adalah untuk menyiapkan dan menaruh sesajen untuk acara kenduri. Dalam selamatan yang dilaksanakan wanita yang sedang berhalangan dan pasangan suami isteri yang belum selesai adat kawinnya dilarang memasuki rumah adat.

Ketiga adalah *melokaq*. *Melokaq* adalah tetua adat yang bertanggungjawab menjaga, memimpin dan memelihara pelaksanaan adat istiadat. Rumah yang ditinggali cukup unik, yaitu teras dan rumah bagian depan dibuat lebih pendek agar orang yang hendak masuk rumah selalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat (*betabeq*) kepada *melokaq* karena dianggap sakral. Siapa pun yang memasuki ruangan itu harus mengenakan pakaian adat berupa sarung dan *sapuq* (ikat kepala).

Keempat adalah *berugaq*. *Berugaq* adalah kelengkapan dari sebuah rumah keluarga yang berada di depan rumah. Fungsinya sebagai tempat musyawarah dusun, acara perkawinan, hajatan, tempat menerima tamu, melahirkan dan sebagai tempat upacara kematian.

Kelima adalah jojor lilit. Jojor lilit adalah lampu penerang yang dibuat dari getah jarak dan batuan kapas yang dililitkan pada bilah bambu. Fungsinya sebagai alat untuk upacara adat agama meskipun dilakukan di tempat-tempat suci di mesjid, rumah *melakoq* dan lain-lain.

Keenam adalah *bangaran*. *Bangaran* adalah tanda atau simbol tempat pemakaman penduduk. Pembangunannya harus disertai dengan Olan-olan Siwaq, terdiri dari 9 jenis jajan pasar

seperti dodol, peset, bubur petak, bubur abang, kelepon, surabi, gegulig, pangan petak dan wajik.

Ketujuh adalah ritual *menyembeg*, yaitu ritual sakral sebagai media untuk ketenangan batin agar tetap sehat, selamat di berbagai hajatan. Untuk itu kunyahan sirih pinang dioleskan di bagian dahi atas, ulu hati dan punggung. Agar sembuh dari sakit maka kunyahan sirih pinang dioleskan pada bagian dahi, pangkal daun telinga, ulu hati, dan punggung.

Kedelapan adalah *genggong*. *Genggong* adalah sejenis alat musik yang terdiri dari alat musik dari irisan kepingan pelepah enau (*genggong*) pada saat terjadi gerhana bulan. Ketika terjadi gerhana bulan penuh mereka beramai-ramai memukul benda-benda seperti lesung, kentongan.

Kesembilan adalah mendewa dan suling dewa. Alat ini dipakai untuk melakukan atraksi kesenian yang bernilai magic, yaitu ketika seseorang harus membayar nazar. Pendukungnya adalah peniup seruling yang mengiringi penari. Acara itu dilengkapi dengan sesaji yang terdiri dari kelapa gading, buah delima, penganang/pebuan. Tari ini dilakukan selama tiga hari tiga malam, delapan hari delapan malam, atau paling sedikit selama satu hari satu malam. Fungsinya adalah untuk menolak segala penyakit.

Kesepuluh adalah *temetian (perisean)*. *Temetian* adalah permainan rakyat dengan saling pukul dengan menggunakan temeti (cambuk) yang terbuat dari rotan sepanjang satu setengah hingga dua meter. Pertunjukan ini berkaitan erat dengan acara-acara adat setempat, sebagai simbol kejantanan, keberanian, dan perjuangan. Acara dilakukan apada acara Maulid Adat, dan secara khusus dilakukan untuk meminta hujan.

Di samping semua hal di atas masih ada norma-norma tradisional yang masih dilaksanakan dan apabila terjadi pelanggaran norma maka pelanggar dikenai sanksi. Ada beberapa bentuk sanksi pelanggaran, misalnya sanksi pelanggaran yang disebut *belo uma*, yaitu pelanggaran dalam bentuk senggolan atau cubitan ketika sedang

dilakukan ritual adat. Pelanggar didenda dan dituntut membayarnya berupa 200 kepeng uang yang tidak bisa diganti dengan bentuk rupiah, gula merah satu lonjor, kelapa satu butir, ayam satu ekor, kambing satu ekor.

Kedua, sanksi pelanggaran puasa di bulan Ramadhan. Apabila orang tidak berpuasa di bulan Ramadhan maka ia juga harus menerima sanksi berupa kesediaan dibawa ke *Amaq Lokaq*, membawa uang bolong sebanyak 440 kepeng, gula merah satu lonjor, beras sebanyak tiga kilogram, ayam sebanyak satu ekor.

Ketiga adalah sanksi pelanggaran dalam hal penganiayaan. Apabila seseorang memukul orang lain tanpa alasan maka ia dinilai melanggar norma. Sanksinya adalah membawa uang bolong sebanyak 244 kepeng, gula merah satu lonjor, ayam satu ekor, kelapa satu butir, dan kambing satu ekor.

Keempat adalah pelanggaran berupa pencurian. Apabila seseorang mencuri maka ia diadili dengan hukum adat sebelum diserahkan kepada yang berwajib (polisi). Bentuk hukumannya adalah sebagai berikut: apabila ia laki-laki, ia didudukkan di atas lesung, dipukuli, diludahi oleh laki-laki seluruh warga kampung satu persatu, diberi makan secara baik-baik dan diserahkan ke polisi. Apabila ia perempuan, ia didudukkan di atas lesung, diludahi matanya, diberi makan dan baru di bawa ke kantor polisi.

Adat lain di dusun Senaru, dan juga dipelihara oleh masyarakat Lombok atau NTB pada umumnya adalah acara Maulid dengan berbagai variasi.

Acara Maulid dilaksanakan di mesjid. Acara disertai dengan atraksi temetin, membaca tulisan yang dilukiskan dalam daun lontar yang kemudian dicelupkan ke dalam mangkok putih yang digunakan sebagai air penyejuk oleh keluarga penyelenggara.

Di samping norma-norma dan aktivitas tradisional seperti diatas, desa Senaru memiliki air terjun yang masih dianggap oleh sebagian masyarakat di sana memiliki nilai magis dan religius. Air terjun tersebut terletak di daerah Jeruk Manis, Desa Kembang

Kuning, desa Sendang Gila, desa Senaru, bersama dengan kondisi budaya masyarakat di desa sekitar kawasan seperti Sembalun, Lawang, Senaru, Kotaraja, menarik bagi para wisatawan.<sup>6</sup>

Contoh lain dari bentuk kebudayaan tradisional masyarakat Lombok yang masih hidup adalah kepercayaan masyarakat dusun Sade, Lombok Tengah, pada kekuatan sakti dalam benda-benda seperti tombak, keris, permata, berlian, batu akik.<sup>7</sup>

Dalam kebudayaan tradisional seperti tersebut di atas tercermin bahwa keyakinan tradisional memuat kesadaran mengenai kekuatan yang melebihi manusia sekaligus mempengaruhi kehidupannya. Penjelasan van Peursen mengenai tahap-tahap kebudayaan memberi pemahaman bahwa secara universal tahap mitis kebudayaan dialami oleh manusia dan dieksternalisasikan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi masing-masing.<sup>8</sup> Itu yang dimaksud kesadaran akan kekuatan transenden merupakan kesadaran yang bersifat universal, semua manusia di belahan dunia mana pun memilikinya. Dalam istilah Nurcholish Madjid bahwa manusia memiliki jiwa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jiwa itu menjadi titik tolak dan dasar bagi seluruh kegiatan kehidupan manusia. Jiwa itu kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan-tindakan kebajikan yang sejalan dengan kemanusiaan universal sehingga berdampak dalam kehidupan bersama.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Siti Nurmah, *Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Industri Pariwisata (studi kasus kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani) tahun 2003-2004*, Lombok: Program Diploma III Pariwisata, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, 2004, hal. 37.

<sup>7</sup> Baio Fatmawati, *Pengaruh Pariwisata terhadap nilai-nilai Budaya Masyarakat dusun Sade, desa Rambitan, kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah*, Lombok: Program Diploma III, Pariwisata Mataram 2004, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, 2004.

<sup>8</sup> C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, hal. 34-54.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, Kebebasan Nurani (*Freedom of Conscience*) dan Kemanusiaan Universal sebagai Pangkal Demokrasi, Hak Asasi dan Keadilan, dalam Elza Peldi Taher (editor), *Demokratisasi Politik, Budaya*

Berkaitan dengan kesadaran dasar manusia dalam menghayati existensinya di dunia, Para Bapak Pendiri Republik Indonesia meletakkannya dalam sila pertama dasar negara Republik Indonesia, yaitu Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kesadaran mengenai Tuhan sejak masa kebudayaan mitis hingga masa kini mendudukkan manusia di bawah kekuasaan Tuhan yang menguasai alam dan manusia. Para Pendiri Republik Indonesia menempatkan kesadaran mengenai Tuhan dalam sila pertama. Apabila mengacu pada pemikiran Aristoteles mengenai sebab-sebab terjadinya segala sesuatu,<sup>10</sup> maka kesadaran mengenai Ada atau Tuhan adalah sebagai sebab materi dari sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sebab materi sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bisa ditemui dalam kepustakaan antropologi hingga sekarang.

Sebagaimana tertulis sebelumnya bahwa kebudayaan mitis mengajarkan atau mewariskan norma kebajikan kepada generasi muda berikut bentuk hukuman terhadap pelanggaran. Misalnya pewarisan nilai kejujuran. Pewarisan nilai kejujuran biasanya dipraktekkan bersamaan dengan hukuman pelanggaran. Banyak sekali bentuk hukuman yang diberlakukan kepada masyarakat. Selain yang disebut di atas masih banyak bentuk hukuman lain. Salah satu contoh yang jelas adalah hukuman dalam kasus pencurian yang terjadi di NTB. Kasus ini berkaitan dengan nilai sakral yang menuntut kepatuhan pada prinsip 'kejujuran'. Tanah memiliki nilai sakral yang menyebabkan pemindahan hak tidak begitu mudah. Apabila terjadi perpindahan hak milik maka kepemilikan jatuh pada mereka yang memiliki garis keturunan atau hubungan darah. Kesakralan tercermin dalam pengejowantahan keyakinan orang sasak bahwa tanah merupakan milik yang menuntut pertanggungjawaban dari pemiliknya baik di dunia maupun di akhirat. Status nilai demikian

---

*dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994, hal. 126.

<sup>10</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1986, hal. 143-144.

dipakai oleh masyarakat sasak untuk menegakkan peradilan berkaitan dengan perbuatan buruk, misalnya mencuri. Bentuk hukuman terhadap pencuri tidak hanya satu macam. Contohnya adalah membuat tertuduh mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara meminumkan air yang dicampur tanah oleh seorang tetua/ahli sambil mengucapkan sumpah. Apabila tertuduh tidak mencuri maka ia akan menolak, sebaliknya apabila tertuduh benar mencuri maka ia akan mengalami sakit yang menyebabkan ia meninggal dunia.<sup>11</sup> Contoh lain adalah memasang mantra pada barang milik yang dilindungi, misalnya tanaman buah di kebun. Aturan dalam mantra itu tidak sama, maksudnya mantra mengizinkan orang mengambil buah satu, lebih dari satu ia akan terkena hukuman secara otomatis, misalnya bagian tubuh si pencuri buah sakit. Bagian tubuh yang sakit tidak akan sembuh apabila si sakit belum datang meminta maaf dan obat ke pemilik tanaman buah. Kasus seperti itu terjadi di Lombok Tengah.

Nilai kejujuran merupakan salah satu nilai moral yang sangat dijunjung tinggi. Kejujuran bersifat universal, dari zaman dahulu hingga kini kejujuran merupakan prinsip hidup. Ini bisa dilihat dalam setiap aturan kehidupan semua bangsa di dunia baik yang bersumber pada agama atau tradisi turun temurun. Apabila kita melihat salah satu karya sastra, teater tradisional, atau drama serial dari Taiwan di televisi, pewarisan nilai-nilai itu sangat kuat. Di Indonesia, para Bapak Pendiri Republik Indonesia mengangkat nilai kejujuran ke dalam Pancasila sebagai *Weltanschauung*, tepatnya dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai bagian dari isi Pancasila. Pengisian prinsip kejujuran sebagai nilai moral ke dalam Pancasila menggambarkan bahwa keyakinan tradisional di atas, maksudnya keyakinan bahwa ada kekuatan gaib yang mengatasi manusia dan alam lingkungan dan kekuatan gaib itu menurunkan nilai kejujuran yang menuntut pemenuhannya dalam hubungan sosial manusia,

---

<sup>11</sup> Sukri Abdurrachman, *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat dan Tuntutan Rakyat*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI, 2004, hal. 265-266.

merupakan sebab material dari penciptaan Pancasila, dalam hal ini sila Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Di masa kini, pemerintah Kota Mataram khususnya dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya, tak henti-hentinya memberi perhatian pada penyimpangan atau pelanggaran moral, misalnya penangkapan penjudi, peminum (peminum miras), atau pelaku prostitusi, menjelang datangnya bulan puasa.

Pemerintah daerah menilai perlu pewarisan nilai yang bersumber pada agama dalam skala yang lebih luas dan formal yaitu melalui pendidikan formal dalam bentuk Pondok Pesantren. Ini dikemukakan oleh Gubernur NTB Hl Serinata melalui Kepala Biro Kesos Setda NTB H. Masnun pada peringatan hari ulang tahun ke-15 Pondok Pesantren Ulil Alhab NW Gegek Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu dunia pendidikan, baik swasta mau pun pondok pesantren, perlu didukung dana dari APBD. Harapannya adalah bahwa di masa depan kita memiliki kader-kader bangsa yang berkualitas.<sup>12</sup> Rencana ini kemudian akan direalisasikan oleh Gubernur baru Tuan Guru Bajang, sesuai dengan janji kampanye, dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis pada tahun anggaran 2009.<sup>13</sup> Menurut Tuan Guru Bajang, dalam acara debat kandidat yang digelar BEM NTB Raya, ada dua kata kunci atau konsep dalam memajukan NTB di masa depan yaitu NTB yang beriman di mana masyarakatnya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai religius dan NTB yang berdaya saing dengan merealisasikan pembangunan sektor pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Untuk itu Tuan Guru Bajang menandatangani kontrak politik dengan mahasiswa di atas meterai Rp.6.000,- Aktualisasi nilai-nilai itu misalnya mengajak masyarakat memerangi penyakit masyarakat seperti prostitusi, perjudian, pengedaran miras dan obat terlarang, melestarikan lingkungan, menghijaukan daerah-daerah gundul,

---

<sup>12</sup> Patroli Post, 29 Juli 2008.

<sup>13</sup> Patroli Post, 15 Juli 2008.



mencegah perambahan hutan. Di bidang politik pemerintah membuka kritik dan saran dalam rangka pembangunan NTB.<sup>14</sup>

Pewarisan nilai dan norma melalui instansi baik instansi pendidikan mau pun lembaga seperti museum juga mencerminkan keinginan positif yang terprogram dari pemerintah untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehubungan dengan melajunya proses globalisasi.

Di alam globalisasi, terutama dalam masyarakat industri maju, kehidupan cenderung digerakkan oleh rasio instrumental. Rasio instrumental tidak memiliki kemampuan memberi makna hidup kepada diri manusia secara penuh karena terikat oleh tradisi masyarakat yang mendasarkan pemikirannya pada cara berpikir positivistik. Cara berpikir positivistik menempatkan rasio sebagai alat atau instrumen dalam memajukan kehidupan. Menurut Max Horkheimer, perannya mengandung bahaya, yaitu bahwa pemikiran instrumental akan mengantarkan manusia pada irrasionalitas biadab.<sup>15</sup> Artinya, pemikiran instrumental menghindarkan manusia untuk peduli pada nilai-nilai, seperti nilai etis, nilai agama, karena baik buruk, hal-hal yang metafisis (misalnya Tuhan) merupakan pernyataan kosong dan tidak dapat diukur secara ilmiah. Implikasi yang jelas tercermin dalam hubungan antar manusia dalam masyarakat industri maju dan masyarakat pada umumnya sebagai hubungan antara yang menguasai dengan yang dikuasai sebagaimana yang terjadi dalam hubungan antara manusia (sebagai yang menguasai) dengan alam (sebagai yang dikuasai) yang didasari oleh cara berpikir gaya ilmu pengetahuan modern (ilmu pasti/alam) yang dipakai untuk menata masyarakat dan mengoperasionalkan sistem ekonomi kapitalis.

Tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah mencari untung berupa uang sebanyak mungkin maka hubungan antar manusia,

---

<sup>14</sup> Patroli Post, 2 Juli 2008.

<sup>15</sup> Terry Eagleton, *Ideology, An Introduction*, London-New York: Verso, 1994, hal. 127.

seperti tercermin dalam hubungan antara pramuniaga dan pembeli dalam resto KFC. Hubungan mereka merupakan hubungan kering. Pramuniaga tinggal menghitung dengan mesin jumlah yang harus dibayar oleh pembeli dan pembeli harus membayarnya. Komunikasi berakhir. Ciri yang tercermin dalam komunikasi antar manusia antara lain adalah efisien (dalam hal waktu komunikasi), mekanik (mengitung dengan mesin).

Kehidupan ini sebenarnya juga ditentukan oleh nilai, seperti nilai solidaritas atau persahabatan, nilai kejujuran, nilai religius dan sebagainya. Dalam hal ini keteladanan TGKHM Zainudin Majid sudah lama bisa dilihat. Misalnya dalam penanaman nilai yang bersumber pada agama, yaitu mengurus anak yatim dan terlantar atau miskin, mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, mengelola organisasi pertanian di lingkungan organisasi NW.

Di masa kini pewarisan norma-norma atau nilai tradisi juga dilakukan oleh lembaga yang terkait dengan bidang pendidikan, misalnya aktivitas yang dilakukan oleh dinas kebudayaan. Untuk mewariskan nilai-nilai tradisional dinas pendidikan mengadakan pelatihan guru-guru kesenian dan sejarah. Artinya dalam kedua bidang tersebut dinas pendidikan mewajibkan para guru untuk memberikan materi pelajaran berupa teori dan praktik kedua bidang pelajaran tersebut. Bentuknya adalah mengenalkan peristiwa masa lalu melalui koleksi benda-benda sejarah yang disimpan di museum, mengenal para pahlawan melalui tinjauan langsung ke makam, studi banding ke luar daerah dalam peringkat nasional, dan pelatihan para guru. Pelatihan para guru dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan mutu dan melestarikan nilai budaya di Kota Mataram terutama nilai budaya sasak sebagai suku mayoritas di Nusa Tenggara Barat.

Di samping itu berkaitan dengan pewarisan nilai-nilai tradisional di Lombok, dinas pendidikan menanamkan kecintaan pada kesenian tradisional Lombok kepada anak-anak lewat lomba kesenian, lewat peningkatan *skill* di bidang kesenian, lewat pemberian bantuan berupa alat-alat kesenian seperti gendang belek, rebana barong, drumb band, alat kesenian qasidah.

Pemerintah Kota Mataram juga memperhatikan dan mewujudkan pesan Para Pendiri Republik Indonesia yang dituliskan dalam UUD '45 pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu perwujudannya adalah memberi perhatian pada kelompok 'gepeng' yang berkeliaran di jalanan meskipun mereka susah didata dan dikumpulkan. Perhatian ini merupakan upaya pewarisan nilai solidaritas pada generasi muda dari pemerintah.

### 3.4. Kepemimpinan Ideal

Menurut Gramsci tipe kepemimpinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemimpinan dengan cara penindasan dan kepemimpinan intelektual dan moral.<sup>16</sup> Kepemimpinan intelektual dan moral merupakan kepemimpinan yang diidealkan oleh pihak-pihak yang menyadari (mantan pejabat dan anggota masyarakat) bahwa masyarakat NTB juga membutuhkan kepemimpinan ideal sebagaimana diinginkan oleh masyarakat pada umumnya. Ini tercermin dalam pengakuan mereka menjelang pemilihan gubernur NTB yang baru saja berlalu.

Warga Nusa Tenggara Barat baru saja memiliki pemimpin baru, yaitu Tuan Guru Bajang (TGB) KHM Zainul Majdi, MA., cucu Almagfurullah Maulasyech TGKHM Zainuddin Majid. TGKHM Zainudin Majid adalah pendiri Nahdlatul Wathan (NW), sebuah organisasi yang memusatkan kegiatannya dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah Islamiyah.<sup>17</sup>

Seperti dikemukakan oleh John Ryan Barsholomew bahwa misi utama NW adalah mendidik orang-orang sasak mengenai

---

<sup>16</sup> Heru Hendarto, Mengenai Konsep Hegemoni Gramsci, dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 66.

<sup>17</sup> H. Abdul Hayyi Nu'man dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan, Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiah*, Lombok Timur: Pengurus Nahdlatul Wathan, 2004, hal. 91.

kewajiban pokok sebagai muslim yang berpegang teguh pada rukun Islam. Mayoritas muslim sasak dididik secara formal dalam sekolah NW atau diajari oleh mereka yang pernah belajar di NW mengenai keagamaan dalam bentuk khotbah di masjid atau pengajian oleh orang yang berpengaruh.<sup>18</sup>

Menurut John Ryan Barsolomew keberhasilan NW di Lombok bisa diatributkan pada keputusan mereka di awal tahun 70-an, yaitu meninggalkan afiliasinya dengan Masyumi dan bersekutu dengan Golkar. Persekutuan ini menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemerintah keuntungan berupa tergabungnya dan dukungan organisasi kepada Golkar, bagi NW keuntungan berupa bantuan pemerintah dalam bentuk pembangunan masjid dan sekolah-sekolah. Aliansi tersebut semakin kuat dengan diangkatnya TGKHM Zainudin Majid sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia.<sup>19</sup> Sekolah yang dikelola NW hingga kini terdiri dari jenjang TK hingga universitas dan tersebar di seluruh wilayah Lombok atau NTB.

Upaya NW untuk membawa masyarakat sasak atau NTB pada ajaran agama Islam dengan berpedoman pada rukun Islam tidak berhenti meskipun tanpa kekerasan. Mulai era 2001-an NW dan Muhammadiyah secara terbuka berusaha mengurangi praktik-praktik menyembah kepada benda mati, atau setiap entitas lain meskipun kemudian lebih keras mendefinisikan secara sempit praktik tersebut sebagai polyteisme.<sup>20</sup> Upaya tersebut ternyata belum berhasil mengubah kesadaran masyarakat sasak untuk melunturkan kepercayaan mereka pada kekuatan gaib selain Allah. Hingga kini masih ada sebagian masyarakat sasak yang memiliki kepercayaan seperti itu meskipun mereka masih sangat menghormati almarhum TGKHM Zainuddin Majid.

---

<sup>18</sup> John Ryan Barsolomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2001, hal. 134.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 134-135.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 154.

TGKHM Zainuddin Majid memiliki kharisma besar dan dikenal sangat luas sebagai ulama besar Indonesia karena ilmu yang dimiliki beliau luas dan mendalam. Ia juga menjadi tokoh panutan yang sangat berpengaruh karena kearifan dan kebijaksanaannya. Perjuangan dan kepemimpinan beliau senantiasa diarahkan untuk kepentingan ummat.<sup>21</sup> Kepopulerannya didukung oleh aktifitasnya sebagai pelopor pendirian masjid dan madrasah, sebagai pendakwah dari desa ke desa se-pulau Lombok. Dalam perjalanannya ia mengajak masyarakat untuk mendirikan panti asuhan dan asuhan keluarga untuk memelihara dan mendidik anak yatim dan anak fakir miskin.<sup>22</sup>

Figur pemimpin seperti TGKHM Zainuddin Majid rupanya kini menjadi impian masyarakat Lombok pada umumnya. Seperti halnya figur pemimpin yang dirindukan oleh sementara pemuda, mahasiswa dan siswa, yang tercermin dalam debat yang digelar radio SWiB FB pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus di Aula Kantor Koperasi Krama Bali (KKB) Amlapura. Di antara mereka memiliki kekhawatiran terjadinya krisis figur yang berpotensi membawa mereka pada pencarian figur sendiri yang tidak sesuai dengan identitas dan kebudayaan ketimuran. Menurut mereka figur-figur seperti tercermin dalam diri para tokoh epos Mahabarata dan Ramayana, seperti Yudistiro dan Rama sebagai raja bijaksana, Bima yang jujur dan perkasa, Arjuna yang gagah dan ahli, Karna dan Gatot yang teguh membela negeri, masih relevan. Selain itu mereka juga menyampaikan keprihatinan pada birokrasi yang belum mampu memberi kemerdekaan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pendidikan yang murah.<sup>23</sup> Realitas sebagaimana tercermin dalam cerita seperti itu dirindukan oleh kalangan masyarakat umum yang

---

<sup>21</sup> H. Abdul Hayyi Nu'man dan Sahafari Asy'ari, *Nahdlatul Wathan, Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiah*, hal. 166.

<sup>22</sup> Muhammad Nasihudin Badri, *Meniti Tapak Sejarah 66 Tahun Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor*, Lombok Timur: Yayasan Pendidikan HANZAMWADI, 2001, hal. 16-17.

<sup>23</sup> *Bali Post*, 16 Agustus 2008, hal. 4.

ditemui di Kota Mataram, seperti mahasiswa, para supir angkot, kusir cidomo, supir taxi, dan sebagainya.

Kerinduan itu tercermin dalam keputusan kehidupan seperti memilih figur pemimpin mereka. Harapan mereka terhadap pemimpin mereka sangat besar meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak bisa mengetahui apakah harapan itu bisa terwujud atau tidak. Di antara mereka ada yang pesimis bahwa harapannya akan terwujud. Alasannya adalah bahwa tidak ada manusia yang tidak memiliki kebutuhan akan kenikmatan dan kenyamanan hidup. Pendapat mereka masuk akal karena sebagaimana dikatakan oleh Abraham Maslow bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah uang. Mereka memahami bahwa atas dasar pengalaman perilaku yang menjurus pada penyimpangan, tanpa menunjuk pada figur pejabat, sulit dihilangkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk tergoda. Akan tetapi bagaimanapun juga mereka tetap berharap agar kejujuran menjadi norma yang dipatuhi.

Figur kepemimpinan yang taat pada kejujuran sangat diharapkan oleh masyarakat umum. Banyak responden yang ditemui mengaku bahwa figur yang dekat dengan almarhum TGKHM Zainudin Majid menjadi tumpuan harapan mereka. Ini suatu hal yang masuk akal karena figur almarhum Tuan Guru tersebut hingga kini masih disegani dan dihormati. Banyak masyarakat yang masih memegang norma berkaitan dengan penghormatan kepada almarhum Tuan Guru, misalnya tidak boleh menilai buruk pada almarhum Tuan Guru yang dalam pandangan hidup Jawa dikenal dengan norma *mikul duwur mendem jero*. Arti istilah *mikul dhuwur* adalah kita harus menghormati orang tua dan menjunjung tinggi nama baik orang tua, sedangkan arti istilah *mendem jero* adalah segala kekurangan orang tua tidak perlu ditonjol-tonjolkan.

Di samping itu figur pemimpin yang diinginkan oleh responden adalah pemimpin yang memiliki nilai moral dan terampil dalam soal pemerintahan. Itu tercermin dalam pertama, tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Mataram bahwa pemimpin (maksudnya Gubernur) yang dipilih adalah yang bukan

koruptor.<sup>24</sup> Ketika itu Gubernur NTB HL Serinata adalah Gubernur yang sedang diduga terkena kasus korupsi.

Kedua, sebagaimana dikemukakan oleh mantan gubernur NTB Harun Al Rasyid bahwa seorang pemimpin adalah orang yang pandai, pintar, memiliki visi dan misi dalam bentuk program yang teratur dan terarah, tidak membohongi rakyat, tidak melenceng dari visi dan misi dan harus menepati janji yang disampaikan ketika berkampanye.<sup>25</sup> Banyak responden, mahasiswa, supir angkot, kusir cidomo (kereta kuda), yang menginginkan pemimpin yang memiliki ciri-ciri seperti tersebut.

Figur seperti tersebut dipandang oleh mereka melekat pada diri Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang, berpasangan dengan Badrul Munir, pada tanggal 14 Juli 2008 terpilih sebagai Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB dengan perolehan suara 847.976. Tuan Guru Bajang-Badrul Munir mengalahkan pasangan HL Serinata-Husni Jibril yang memperoleh suara sebanyak 576.123 dan pasangan Zaini Arony-Nurdin Ranggabarani dengan jumlah suara 387.875.<sup>26</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh harian Patroli Post pasangan baru tersebut membuat gebrakan perdana, yaitu membentuk tim untuk 'kabinet bersih'. Seusai acara penetapan pasangan Cagub dan Cawagub, Badrul Munir mengatakan bahwa meskipun zaman sekarang jarang ditemukan birokrat yang bersih namun dirinya yakin bahwa masih ada mutiara terpendam yang ada pada birokrat.<sup>27</sup> Sebenarnya kesadaran bahwa jarang ditemukan birokrat yang bersih juga dimiliki oleh para anggota masyarakat yang ditemui, seperti mahasiswa, kusir cidomo, supir angkot, para pedagang dan lain-lain. Maka tidak salah apabila mereka mengharapkan birokrat yang bersih dalam era kepemimpinan baru.

---

<sup>24</sup> Patroli Post, 7 Juli 2008.

<sup>25</sup> Patroli post, 1 Juli 2008.

<sup>26</sup> Patroli Post, 15 Juli 2008.

<sup>27</sup> Patroli Post, 15 Juli 2008.

### 3.5 Rasionalitas Masa Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan kelahiran sistem ekonomi kapitalis. Percepatan munculnya sistem ekonomi kapitalis di Barat terjadi di masa Aufklarung, abad 18. Pada masa itu muncul bentuk kapitalisme yang disebut kapitalisme industri. Kapitalisme industri merupakan kelanjutan dari bentuk kapitalisme sebelumnya yang disebut kapitalisme saudagar yang telah dimulai kira-kira pada abad 15.

Kemunculan kapitalisme industri terkait dengan pecahnya revolusi industri yang berawal di Inggris melalui penemuan mesin uap. Revolusi industri dengan teknik-teknik modern memungkinkan lahirnya industrialisasi sekaligus masyarakat industri. Bersamaan dengan munculnya kapitalisme industri dan kesadaran modern di Barat, di Eropa lahir pula gerakan rasionalisme dan subyektivitas yang di masa kemudian melahirkan lagi aliran yang disebut empirisme. Seorang filsuf yang berperan besar dalam pemikiran modern adalah Rene Descartes (1596-1650), yang dikenal sebagai Bapak Filsafat Modern. Ucapan termasyhur dari Descartes adalah "*cogito ergo sum*" (saya berpikir maka saya ada). Maknanya adalah bahwa alam lahiriah sebagai alam yang berbeda dengan alam batiniyah, dan pengetahuan mengenai kenyataan yang kita hasilkan adalah pengetahuan yang bersumber pada pemikiran bukan pengetahuan yang berasal dari wahyu atau tradisi.<sup>28</sup>

Fenomena modernisasi dipandang oleh Max Weber dan Aliran Frankfurt sebagai proses rasionalisasi, yaitu proses menyebar dan berkembangnya rasionalitas ke seluruh segi kehidupan dan perilaku manusia.<sup>29</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Franz Magnis-

---

<sup>28</sup> Harun Hadiwiyono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1994, hal. 18-26.

<sup>29</sup> F. Budi Hardiman, Mengatasi Paradoks Modernitas, Habermas dan Rasionalisasi Masyarakat, dalam Tim Redaksi Driyarkara, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 136.



Suseno bahwa salah satu wajah rasionalitas modern adalah rasio instrumental yang terutama menguasai bidang ekonomi. Rasionalitas yang menguasai bidang ekonomi kemudian menjajah seluruh dimensi kehidupan nyata yang kita alami sehari-hari, di mana kita bergerak dan di mana nilai-nilai dan tradisi dibentuk, dihayati, berkembang dan diteruskan. Rasionalitas menjadi egoisme individualistik yang sudah dibebaskan dari keterikatan tanggungjawab sosial tradisional. Sikap egositik individualistik hanya mengusahakan kepentingannya sendiri tanpa perlu memperhatikan orang lain.<sup>30</sup> Salah satu contoh kerja rasio instrumental yang menindas bidang kehidupan sehari-hari, yaitu bidang moral, adalah kerja rasio instrumental dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan, melalui teknologi dan industri hingga habis. Kerja rasionalitas ini merugikan generasi berikutnya. Sikap seperti itu jelas merupakan sikap yang tidak sesuai dengan sikap moral. Di sini letak penindasan rasio instrumental dalam bidang ekonomi terhadap dimensi moral, tidak mencerminkan adanya tanggungjawab moral. Perbuatan yang mencerminkan adanya tanggung jawab moral adalah perbuatan yang mengakibatkan banyak orang merasa senang dan puas, misalnya melestarikan lingkungan alam atau hutan. Melestarikan lingkungan alam adalah perbuatan yang bermanfaat bagi banyak orang atau seluruh umat manusia. Bentuk perbuatan seperti tersebut sesuai dengan kriteria penentuan baik buruknya perbuatan menurut teori utilitarisme, yaitu *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

Salah satu contoh dari kerja rasio instrumental yang kini bisa ditemui di Nusa Tenggara Barat adalah aktivitas penambangan emas oleh PT Newmont. Tanpa harus menghitung dengan teliti dan mendetil, kita sebenarnya memahami bahwa keberadaan penambang emas dari Amerika dalam bentuk legal merupakan salah satu bentuk penindasan kapitalis asing terhadap negara berkembang yang lemah modal seperti teknologi, keahlian. Kapitalis asing selalu mencari

---

<sup>30</sup> Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 248-250.

sasaran ke negara berkembang karena negara berkembang memiliki kekurangan modal, terutama sumberdaya manusia dan modal berupa uang sedangkan kapitalis asing bertujuan mengumpulkan keuntungan berupa uang sebanyak mungkin. Penambangan emas oleh pihak asing dikatakan sebagai penindasan karena kapitalis asing memiliki modal berupa keahlian, teknologi sehingga mampu membawa keuntungan banyak ke negaranya dan sedikit jumlah penghasilan yang diperoleh negara yaitu Indonesia, rakyat banyak tidak mengalami keuntungan yang berarti dengan eksplorasi emas itu.

Dalam hal kekayaan bumi, para Bapak Pendiri Republik Indonesia sudah berpesan dalam UUD '45 pasal 33 ayat 3, yaitu bahwa 'bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Berkaitan dengan modal, penambangan emas di Sumbawa adalah permasalahan nasional yang perlu pemecahan secara bijaksana apabila kemakmuran rakyat sebagaimana dipesankan oleh Para Pendiri Republik Indonesia sungguh-sungguh ingin diprioritaskan. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah masalah kemampuan modal seperti teknologi, keahlian, yang belum dimiliki oleh bangsa kita secara cukup. Untuk itu perlu pendidikan yang mengarah ke bidang tersebut agar bangsa sendiri mampu mengelola sumberdaya alam yang kita miliki. Barangkali apabila ada keberanian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk menghentikan penambangan oleh pihak asing dan sementara dengan cara sesusah apa pun penambangan itu dipersiapkan bagi bangsa sendiri maka dalam kurun beberapa waktu bangsa Indonesia mampu mandiri dalam hal ekonomi.

Dalam hal pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, Para Pendiri Republik Indonesia pada awal berdirinya negara Republik Indonesia sudah mencantulkannya dalam tujuan negara yang tertulis dalam pembukaan UUD '45. Maka pesan dalam UUD '45 itu diharapkan selalu dipahami, diperhatikan secara sungguh-sungguh dan diusahakan perwujudannya bagi kepentingan bangsa agar ketidakadilan ekonomi bisa diminimalisir.

Di samping itu, berkaitan dengan ketidakadilan ekonomi kini muncul fenomena di Kota Mataram yang bermotto Maju dan Religius, fenomena seperti itu banyak dijumpai di kota-kota besar, yaitu bertambahnya warga miskin yang disebut dengan istilah 'gepeng' (gelandangan pengemis). Mereka banyak beroperasi di mall, di persimpangan jalan raya, seperti persimpangan BI, AMM. Fenomena ini mengindikasikan semakin bertambah banyaknya warga miskin yang menuntut bertambah banyaknya tanggungjawab negara yang harus dipikul berkaitan dengan perkembangan perekonomian dunia yang didominasi oleh negara industri maju. Mengenai hal ini, yaitu keberadaan kaum miskin, Para Pendiri Republik Indonesia sudah menitipkan pesan kepada penyelenggara pemerintahan agar fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pesan ini dituliskan dalam UUD '45 pasal 34 yang berbunyi: 'fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.' Menurut harian Lombok Post tanggal 12 Agustus 2008, halaman 10, pemerintah Kota Mataram hingga kini masih merasa kesulitan untuk mendata mereka, apalagi mereka kini banyak berkeliaran, meskipun banyak upaya yang telah diambil.

Sementara itu aktivitas rasio instrumental juga bisa kita jumpai dalam bidang bisnis, yaitu bisnis *Kentucky Fried Chicken* (KFC) di kota Mataram. Bisnis ini kini terlihat mengalami kemajuan dengan dibukanya resto baru. Ini menandakan bahwa pengusaha resto asing semakin mampu meraih keuntungan (laba) dan mengakumulasi modal sehingga bisnisnya semakin berkembang.

Fenomena yang bertentangan itu, yaitu semakin bertambahnya jumlah warga miskin dan semakin berkembangnya usaha bisnis resto asing, sebenarnya menimbulkan kekhawatiran masa depan karena dunia kita yang telah dikuasai oleh sistem ekonomi kapitalis asing tidak memberi kesempatan longgar kepada dunia kehidupan kita sehari-hari, dunia di mana kita bergaul dengan dasar nilai-nilai, dunia di mana terjadi pewarisan nilai. Menurut

catatan Buklet Edisi IV 2007 banyaknya keluarga miskin di Kota Mataram berjumlah 37.043 orang.<sup>31</sup>

Kenyamanan hidup sehari-hari yang dinikmati melalui produk kebudayaan modern seperti peralatan rumah tangga, fasilitas kendaraan bermotor, dan lain sebagainya, mendorong masyarakat untuk memuaskannya. Ini akan semakin mencolok terlihat di tingkat pejabat ketika munculnya kasus korupsi yang menimpa pemerintahan NTB.

Masalah kemiskinan tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan sistem ekonomi dunia masa kini yang disebut kapitalisme global. Kapitalisme global bergerak atas dasar ideologi neoliberalisme. Dalam kapitalisme global berlaku tiga tujuan yang dilegalkan oleh World Trade Organisation (WTO) yaitu perdagangan bebas barang dan jasa, perputaran bebas permodalan, dan kebebasan berinvestasi.<sup>32</sup> Tujuan itu memberi peluang bagi kapitalis asing untuk mengembangkan sayapnya di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Pertama, seperti yang sudah disebutkan di atas, adalah penambangan emas di pulau Sumbawa oleh perusahaan Amerika. Apabila ada pekerja Indonesia yang bekerja di sana hasilnya penghasilan mereka hanya sebatas kepentingan pekerja itu sendiri, belum memenuhi kepentingan nasional. Kedua adalah usaha bisnis KFC yang sebelumnya hanya beroperasi di wilayah perdagangan Cakranegara, kini sudah membuka di wilayah Kota Mataram. Bagaimana nasib pemodal kita yang lemah menghadapi pasar bebas di saat Kota Mataram menjadi kota pariwisata nanti? Dilihat dari perkembangan perekonomian global, mungkin banyak investor asing yang berinvestasi di Nusa Tenggara Barat. Dengan ini maka kelompok tertentu yang mampu menggunakan fasilitas di resto asing seperti KFC. Masyarakat pada umumnya tidak demikian.

---

<sup>31</sup> *Buklet Edisi XIV 2007*, Mataram: Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Mataram, 2007, hal. 32.

<sup>32</sup> Susan George, *A Short History of Neo-Liberalism*, Confrence on Economic Soverengnty in a Globalising World March 24-26, 1999, <http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/histneol.htm>

Sebagaimana dituliskan oleh Endang Retnowati bahwa<sup>33</sup> pengaruh usaha resto asing hanya tampak pada pola konsumsi dan gaya hidup sebagian kecil masyarakat Nusa Tenggara Barat, yaitu mereka yang berpendapatan tinggi, misalnya pada gaya hidup yang tercermin dalam acara ulang tahun diselenggarakan di resto cepat saji. Tradisi masyarakat pada umumnya tidak mengalami perubahan berkaitan dengan masuknya usaha resto asing tersebut. Seiring dengan itu pemerintah daerah masih berusaha mempertahankan budaya tradisional, misalnya makanan khas, kesenian khas, adat istiadat khas dan sebagainya. Begitu pula dengan para tokoh masyarakat, mereka masih melakukan upacara tradisi seperti upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.

Akan tetapi di saat nanti Kota Mataram benar menjadi kota pariwisata tidak mustahil nilai-nilai budaya tradisional masyarakat NTB terancam terkikis seiring dengan mobilitas hidup yang dituntut oleh kemajuan zaman seperti efisien, disiplin, dan sebagainya. Upacara-upacara tradisional yang memakan waktu banyak mungkin tidak menarik lagi bagi generasi muda.

### 3.6. Tantangan

Apabila memahami pentahapan kebudayaan van Peursen masa modern dimulai ketika manusia tidak lagi melihat alam lingkungan sebagai alam fisik atau alam lahiriah yang melingkupi dan mempengaruhi manusia tetapi melihat alam lingkungan sebagai obyek untuk dimanfaatkan atau dimanipulasi demi pemenuhan kebutuhan manusia. Posisi manusia tidak berada di dalam alam lingkungan tetapi berjarak dengan alam lingkungan (obyek berada di luar lingkungan subyek). Tahap ini dalam pandangan van Peursen termasuk sebagai kategori tahap ontologi. Dalam tahap kebudayaan

---

<sup>33</sup> Endang Retnowati, Peran dan Pengaruh Industri Makanan Dari Negara Industri Maju Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam Endang Retnowati (editor), *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hal. 62.

ontologis manusia melangsungkan proses modernisasi secara mengejutkan, manusia mulai menemukan alat kebutuhan hidup atas dasar perkembangan ilmu yang sangat pesat, seperti mesin-mesin, yang mampu mengubah cara manusia menghadapi alam atau memanipulasi alam demi kebutuhan manusia sendiri.

Sebenarnya van Peursen tidak secara kaku menjelaskan kebudayaan dalam tiga tahap, yaitu kebudayaan mitis, kebudayaan ontologis dan kebudayaan fungsional karena menurut van Peursen dalam tahap kebudayaan fungsional atau kebudayaan ontologis masih terjadi aktivitas kebudayaan mitis.

Apabila disejajarkan dengan pembagian masa seperti dalam sejarah filsafat<sup>34</sup> masa modern diawali oleh masa Renaissance abad 16 dan memuncak pada masa Aufklarung abad 18. Renaissance lahir dalam tahap kebudayaan yang disebut oleh van Peursen sebagai tahap kebudayaan ontologis. Tahap kebudayaan ontologis adalah tahap di mana manusia menilai alam lingkungan sebagai alam yang terpisah, berjarak dan obyek bagi kepentingan manusia.

Ciri khas masa Renaissance di dunia Barat adalah menonjolnya manusia sebagai pribadi perseorangan dan sebagai yang berkuasa. Ciri tersebut tampak dalam bidang seni, politik, filsafat, agama maupun gerakan-gerakan melawan agama, ilmu pengetahuan dan teknik. Salah seorang tokoh yang berpendirian demikian adalah Francis Bacon. Ia hidup di ambang masa modern. Menurut Bacon dasar segala pengetahuan adalah triganda yang dimiliki oleh manusia yaitu ingatan (*memoria*), daya khayal (*imaginatio*), dan akal (*ratio*) dan ilmu yang berkembang harus membawa keuntungan bagi manusia, harus memperkuat kedudukan manusia di bumi. Dalam rangka itu ilmu berkembang pesat dalam sejarah Barat sejak abad 15, misalnya dalam menyebarkan buku-buku pengetahuan lewat jasa percetakan, dalam bentuk kemenangan

---

<sup>34</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: 1986, hal. 44-45.

dalam perang modern melalui mesiu, dalam bentuk kemampuan manusia mengarungi samudera melalui pemakaian magnet.<sup>35</sup>

### 3.7. Penutup

Peran penting kebudayaan tradisional di alam globalisasi adalah memelihara solidaritas, moralitas (misalnya kejujuran) melalui institusi pendidikan seperti pondok pesantren, dan lain sebagainya. NTB yang belum mengalami sebagai wilayah yang menjadi sasaran sistem kapitalisme secara besar-besaran meskipun di sana sudah ada Newmont, KFC, tetapi sebagian besar masyarakat (biasanya yang bermukim di pedesaan) masih memelihara nilai-nilai tradisional mereka.

Pemeliharaan nilai, pewarisan nilai akan berlangsung lama dan tidak luntur oleh pengaruh globalisasi apabila pendidikan moralitas dan penegakan hukum bisa terlaksana di NTB.

Oleh karena itu, seperti tertulis dalam buku Profil 13 Tahun Kota Mataram, yaitu “Mengenang sejarah adalah tanda-tanda orang besar”, sebenarnya pelajaran sejarah sangat penting bagi generasi muda untuk mengambil makna yang berguna bagi kemajuan bangsa. Sejarah, dalam hal ini terutama sejarah mengenai berdirinya Republik Indonesia, sejarah mengenai perjuangan para pahlawan ketika mempertahankan tanah air dari penjajah adalah materi yang sangat berharga bagi generasi muda untuk membangun diri, bangsa dan tanah air, demi masa depan betapa pun dahsyatnya globalisasi melanda dunia. Suatu masa depan yang sangat memprihatinkan apabila bangsa sendiri menjadi sasaran sistem ekonomi kapitalis dan tidak berdaya menghadapinya. Tidak mustahil apabila strategi bangsa untuk menghadapi globalisasi, dalam hal ini sistem kapitalis asing, tidak memihak pada masa depan bangsa maka pengangguran, ketidakadilan akan dialami oleh generasi muda. Untuk itu pendidikan

---

<sup>35</sup> C. Verhaak dan R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991, hal. 137-139.

yang membangun bangsa yang cerdas adalah lebih utama bagi menyongsong masa depan agar penindasan tidak terulang lagi, yaitu penindasan dalam wajah berbeda dengan masa penjajahan dahulu.<sup>36</sup>

Menurut sejarah pulau Lombok telah mengalami berbagai penindasan, mulai dari zaman Belanda hingga menjelang kemerdekaan. Karena itu masyarakat memiliki tugas untuk membela bumi leluhur ketika arus globalisasi melanda Nusa Tenggara Barat. Masalahnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat secara kuat ketika globalisasi masuk ke Nusa Tenggara Barat sehingga masyarakat memiliki kekuatan baik kekuatan ekonomi maupun kekuatan sumber daya manusia.<sup>37</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan pasar bebas, seperti yang dibuat oleh WTO, itu benar-benar membuka kemungkinan bagi kapitalis asing untuk menguasai bumi milik rakyat karena mereka memiliki modal. Terlebih lagi apabila undang-undang Indonesia mengenai penanaman modal asing mengizinkan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia selama 90 tahun. Itu artinya dua generasi bangsa Indonesia kehilangan hak guna di buminya sendiri untuk kepentingan kapitalis asing karena kapitalis butuh modal. Apalagi harga tenaga kerja di Indonesia murah maka kapitalis asing akan lebih memilih tenaga kerja Indonesia karena menguntungkan karena tujuan kapitalis adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Semua itu mungkin terjadi karena kekurangmampuan baik kemampuan ekonomi maupun kemampuan sumber daya manusia untuk bersaing dan berusaha. Dengan kata lain kurang memiliki kemampuan untuk berhadapan dengan kapitalis asing karena mengalami kelemahan modal (maksudnya modal berupa keahlian, teknologi, atau pun uang).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Endang Retnowati, Peran dan Pengaruh Industri Makanan dari Negara Industri Maju di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam Endang Retnowati (editor), *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2007, hal. 83-84.

<sup>37</sup> Ibid, hal. 84.

<sup>38</sup> Ibid, hal. 84-85.



Tidak terciptanya tenaga ahli yang mampu mengimbangi kemampuan negara industri maju dalam waktu singkat adalah sebagai kegagalan Orde Baru, sedangkan arus globalisasi yang terus mengalir dengan deras bersamaan dengan terbukanya pasar bebas secara luas yang memberi peluang kepada kapitalis asing untuk mengembangkan usahanya, maka masa depan bangsa perlu secara serius dipikirkan.

Dilihat dari kacamata UUD '45 masuknya kapitalis asing adalah sebagai bentuk baru dari penjajahan karena kapitalis asing menjadi pihak yang memiliki kedaulatan di wilayah tanah air, artinya kapitalis memiliki kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri di negeri Indonesia. Meskipun bentuk penjajahan berbeda dengan bentuk penjajahan masa lalu tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa pihak asing ingin memperoleh keuntungan besar dari Indonesia. Cara yang ditempuh memang berbeda. Cara yang ditempuh di masa penjajahan adalah dengan kekerasan. Pada masa penjajahan Belanda kepemilikan rempah-rempah secara bebas dan melimpah adalah sebagai tujuan penjajahan. Begitu pula di masa penjajahan Jepang, ketika itu Jepang kesulitan memperoleh bahan makanan, lalu Jepang menguasai bumi Indonesia dan membawa bahan makanan dari Indonesia ke Jepang sehingga bangsa Indonesia sangat menderita karena kelaparan.<sup>39</sup>

Apabila kehadiran sistem ekonomi kapitalis asing memang tidak bisa dihindari dalam waktu mendesak maka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD '45 adalah lebih sebagai upaya paling utama. Alasannya adalah lebih didasarkan pada sisi negatif rasionalitas yang menjadi salah satu ciri kebudayaan modern.<sup>40</sup> Oleh karena itu wacana dan janji yang dikemukakan oleh para kandidat Kepala Daerah ketika berkampanye perlu direalisasikan.

---

<sup>39</sup> Ibid, hal. 85-86.

<sup>40</sup> Ibid, hal. 86.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrachman, Sukri, 2004, *Konflik Pertanahan di Era Reformasi: Hukum Negara, Hukum Adat dan Tuntutan Rakyat*, Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Badri, Muhammad Nasihudin, 2001, *Meniti Tapak Sejarah 66 Tahun Pondok Pesantren Darunnahdlatain Nahdlatul Wathan Pancor*, Lombok Timur: Yayasan Pendidikan HANZAMWADI.
- Bagus, Lorens, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Barsolomew, John Ryan, 2000, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Bertens, K., 1986, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Eagleton, Terry, 1994, *Ideology, An Introduction*, London-New York: Verso.
- Erni Budiwati, 2005, *Kajian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya Sasak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Barat*, Lombok: Program Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Fatmawati, Baio, 2004, *Pengaruh Pariwisata Terhadap Nilai-nilai Budaya Masyarakat Dusun Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah*, Lombok: Program Diploma III, Pariwisata Mataram, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram.
- George, Susan, 1999, *A Short History of Neo-Liberalism*, Conference on Economic Sovereignty in a Globalising World March 24-26, 1999, <http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/histneol.htm>
- Hadiwiyono, Harun, 1994, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius.

- Horkheimer, Max dan Theodor W. Adorno, 1973, *Dialectic of Enlightenment*, (terjemahan oleh John Cumming), London: Allen Lane. K.
- Magnis-Suseno, Franz, 1995, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Nurmah, Siti, 2000, *Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya Industri Pariwisata (studi kasus kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani) tahun 2003-2004*, Lombok: Program Diploma III Pariwisata, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
- Nu'man, H. Abdul Hayyi dan Sahafari Asy'ari, 2004, *Nahdlatul Wathan, Organisasi Pendidikan, Sosial dan Dakwah Islamiah*, Lombok Timur: Pengurus Nahdlatul Wathan.
- Retnowati, Endang (editor), 2006, *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press.
- Taher, Elza Peldi (editor), 1994, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi, Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Tim Redaksi Driyarkara, 1993, *Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Verhaak, C dan R. Haryono Imam, 1991, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-ilmu*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Majalah:**

- Buklet Edisi XIV 2007*, Mataram: Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Mataram.
- Masyarakat Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004

**Koran:**

Bali Post, 16 Agustus 2008.

Patroli Post, 7 Juli 2008.

Patroli post, 1 Juli 2008.

Patroli Post, 15 Juli 2008.

Patroli Post, 29 Juli 2008.

Patroli Post, 2 Juli 2008.

Patroli Post, 29 Juli 2008.

Patroli Post , 15 Juli 2008.

---

---

## **BAB IV**

---

---

# **PEMAKNAAN POLITIK KEBUDAYAAN ANTAR ELITE DI MATARAM DALAM MEREPRERENTASIKAN IDENTITAS KEBUDAYAAN**

Oleh Sutamat Arybowo

### **4.1. Pengantar**

**M**asyarakat Kota Mataram termasuk memiliki budaya pluralis seperti yang dimiliki oleh kota-kota besar daerah lain di Nusantara. Hal ini tampak juga pada identitas budayanya telah melebur dalam agama. Salah satu agama yang amat menonjol adalah Agama Hindu yang sudah lama dianut oleh masyarakat di sini dan masuk di daerah ini pada abad ke-7 Masehi. Para umat yang menganut agama tersebut, hampir tidak dapat lagi membedakan yang mana pola kebudayaan dan yang mana kepercayaan, dikarenakan oleh akulturasi budaya secara sistimatis. Juga para penganut Agama Islam, suku bangsa Sasak sebelum menganut Agama Islam mempercayai adanya kekuatan gaib melalui pemujaan terhadap roh para leluhur yang berarti masih kepercayaan “Animisme” dan roh penunggu yang mendiami berbagai tempat seperti gua, gunung, pohon, sungai, sawah, dan rumah serta tempat lainnya.

Saat ini Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat berbagai macam persoalan, baik yang dibawa oleh para pendatang dari seluruh nusantara, maupun wisatawan asing yang lama menetap di sini. Juga dihadapkan oleh dampak pulau Dewata khususnya dari Denpasar Bali. Salah satu yang amat dirasakan penduduk setempat adalah adanya “*Cottage* atau *Bungalow*” di daerah Lombok Barat, sebagai tempat rekreasi yang berorientasi usaha.

Dibalik usaha tersebut terdapat nuansa kultur yang di luar kebiasaan masyarakat sekitarnya. Misalnya, perilaku-perilaku yang kurang etis di mata masyarakat Lombok, khususnya bagi masyarakat Kota Mataram yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Selain pengaruh tersebut, juga dampak globalisasi yang mempercepat perubahan-perubahan. Akan tetapi pada dasarnya masyarakat memiliki kearifan lokal yang relatif sulit dipengaruhi oleh pendatang dari luar. Para pendukung kearifan itu dari generasi ke generasi tidak sama perwujudannya sehingga lambat laun bergeser ke arah transformasi dengan menyesuaikan keadaan lingkungan sekarang.

Di samping adanya globalisasi dan arus informasi baik melalui media cetak, media elektronik, dan sejenisnya maupun orang perseorangan membawa kebiasaannya dari negara asal dan membuat kultur baru yang disesuaikan dengan adat istiadat setempat. Kemungkinan para pendatang melakukan dipusi budaya yang mencoba memodifikasi kebiasaannya yang diwujudkan dalam bentuk tersendiri. Kemungkinan itu terjadi karena diberbagai daerah seringkali menampakkan atau berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi setempat dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya. Namun demikian, di satu sisi masyarakat meningkat penghasilannya, tetapi pada sisi lain warga setempat disudutkan oleh kebiasaan pendatang berpenampilan seakan kurang etis. Jika demikian halnya, berarti terjadi benturan nilai yang diselimuti dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi peradaban masyarakat terusik dengan penampilan yang kurang etis dari orang asing tersebut.

Masyarakat Mataram yang mayoritas etnis Sasak amat kuat dengan tradisi budaya Islamnya, meski ada beberapa pendukung budaya dan tradisi lain seperti agama Hindu dan Kristen, tetapi tetap memperlihatkan corak serta karakteristik para penganut agama masing-masing. Dengan demikian mereka memaknai agama sebagai suatu fenomena kultural dan sering bertujuan untuk menyingkapi distorsi ataupun kesenjangan sosial budaya antara perilaku berdasarkan konteks budaya lokal.

Dalam bab ini mencoba melihat bagaimana masyarakat Kota Mataram yang pluralistik itu melalui elite-nya telah merepresentasikan identitas kebudayaannya. Khususnya bagaimana ikon “Tuan Guru” dapat dijadikan simbol budaya sehingga dapat mempengaruhi audien untuk kepentingan dan merepleksikan politik kebudayaan di Kota Mataram.

## **4.2. Tuan Guru Bajang dan Nahdatul Wathan**

Nahdatul Wathan (NW) adalah organisasi keagamaan Islam (Jamiyah Diniyah Islamiyah) yang memiliki kegiatan utama dalam bidang pendidikan, sosial dan Dakwah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tanggal 1 Maret 1953 bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1372 Hijriyah.

Pendirian organisasi NW dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya suatu badan yang dapat berfungsi sebagai koordinator, pembimbing dan pengayom dari kegiatan madrasah Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nahdatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang telah berkembang pesat dengan banyaknya cabang-cabang kedua madrasah itu tersebar di berbagai wilayah dan desa di Pulau Lombok. Kedua madrasah itu, NWDI dan NBDI, kini telah diintegrasikan menjadi Pondok Pesantren Darun Nahdatain NW (PPDNW) Pancor yang menjadi induk madrasah NW yang tersebar di wilayah Nusantara.

Perjuangan NW dimulai sejak kelahiran Madrasah NWDI telah mencapai 69 tahun lamanya, dari tahun ke tahun terus mengalami dinamika dan perubahan. Adapun perubahan penting yang dialami organisasi NW adalah berkembangnya peran dan fungsi NW sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan aktivitas dalam bidang penguatan masyarakat sipil. Oleh karena itu NW sekarang dikenal sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Perkawinan TG Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dengan Hj. Johariyah melahirkan seorang putri yang bernama Hj. Rahun. Dari rahim Hj. Rahun lah Tuan Guru Bajang Zainul Majdi terlahir.

Jadi Tuan Guru Bajang adalah cucu TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sang pendiri NW.

### **4.3. Profil Tuan Guru Bajang Sebagai Ikon**

K.H Muhammad Zainul Majdi, MA alias Taun Guru Bajang lahir di Pancor Lombok Timur pada tanggal 31 Mei 1972 M / 18 Rabiul Akhir 1392 H. Ia merupakan putra ketiga dari pasangan H.M Djalaluddin, SH dengan Ummi Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Madjid. Mengenyam pendidikan dasar di SDN 2 Mataram, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Mua'allimin Nahdatul Wathan Pancor, Ma'had Darul Qur'an wal hadist Nahdatul waton Pancor. Kemudian ia melanjutkan studi di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al Qur'an Universitas Al Azhar Cairo (Mesir) dan lulus meraih gelar Lc pada tahun 1995 dan Master of Art (MA) pada tahun 2000. Sejak tahun 2002 menjadi kandidat doktor di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al Qur'an Universitas Al-Azhar Cairo (Mesir). Pada tahun 1997 Tuan Guru Bajang menikahi Hajjah Rabiatal Adawiyah, SE putri K.H Abdul Rasyid Abdullah Syafii, pimpinan Perguruan Islam Pondok Pesantren As Syafiiyah Jakarta dan telah dikaruniai 4 orang putra dan putri.

Selain aktivitas dakwahnya yang makin luas baik di daerah Nusa Tenggara Barat maupun di Jakarta dan sekitarnya, TGB juga mendapat sejumlah kepercayaan dari ummat yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan Anggota Komisi X DPR-RI periode 2004 – 2009. Ia juga memangku amanat sebagai Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor – Lombok Timur, ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, dan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathan Pancor.

### **4.4. Perpecahan di Tubuh Nahdatul Wathan**

NW sebagai organisasi sosial kemasyarakatan semakin mengakar di tengah masyarakat NTB sejak awal berdirinya tahun 1953. sampai era Orde Baru tahun 1980-an, pendiri NW – Maulana Syeh dan NW praksis tak menunjukkan ketertarikan politik yang



...sungguh-sungguh. Kerja sosial tetap menjadi roh pertumbuhan NW yang semakin menggurita kemana-mana. Keputusan Maulana Syeh untuk mendukung Golongan Karya (Golkar) pada tahun 1971, lebih disebabkan alasan ideologis ketimbang alasan politis. Dikarenakan hanya Golkar yang ketika itu yang mampu membendung arus komunisme di Pulau Lombok.

Selanjutnya ia memutuskan keluar dari Golkar pada tahun 1982 dan membebaskan pendukungnya untuk memilih salah satu partai. Keputusan tersebut tidak dipahami sebagai manuver politik melainkan cerminan dari kekecewaan mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap Orde Baru yang semakin di dominasi militer yang represif terhadap umat Islam.

Pada tahun 1987, ia memutuskan kembali ke Golkar, di situ pertama kali ia mengambil sebuah keputusan politik. Sejak saat itu, meskipun NW tetap diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan sosial, namun mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik. Politik lantas seperti pisau bermata dua bagi NW. Di satu sisi, politik telah mempertajam kerja sosial NW, namun di sisi lain, politiklah yang telah membangun jarak antara NW dengan para ulama dan kelompok Islam lainnya di Lombok yang tidak satu afiliasi politik.

Politik pulalah yang pada akhirnya melatar belakangi terjadinya tragedi September 1998 yang menjadi embrio munculnya dua kubu NW: Anjani dan Pancor. Transformasi evolusi NW dari gerakan sosial menjadi gerakan politik semakin menjadi nyata, ketika konferensi wilayah NW secara resmi menghadang TGB Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) menjadi calon Gubernur NTB pada pilkada 2008.

#### **4.5. Sekilas Tentang Pesaing Politik Tuan Guru Bajang**

Pada era pilkada langsung di daerah Nusa Tenggara Barat, terjadi transformasi politik bahwa masyarakat menghendaki perubahan dominasi kepemimpinan yang penting “Asal Bukan Lalu”. Maksudnya gubernur yang terpilih nanti jangan sampai diduduki

kalangan bangsawan Lombok (Sasak). Oleh karenanya sebagai pesaing utama Tuan Guru Bajang adalah gubernur *incumbent*, yaitu Lalu Serinata yang kebetulan juga Ketua Golkar NTB. Tetapi calon gubernur lainnya juga berat, karena merupakan politikus lama yang sudah berpengalaman di birokrasi.

- **Lalu Serinate – Husni Jibril**

Serinate adalah Gubernur NTB dan Ketua GOLKAR NTB dan Husni Jibril adalah Sekjen PDIP NTB. Serinate juga di usung oleh PBR dan ketua PB NW Anjani yaitu Umi Raihanun Zainuddin Abdul Madjid. Selain itu ia merupakan politikus lama yang sudah berpengalaman pada masa Orde Baru. Dalam perjalanannya ia selalu mendapat legitimasi dari kalangan bangsawan di Pulau Lombok.

- **Zaini Aroni – Nurdin Manggabarani**

Zaini yang berusia 50-51 adalah calon dari Kediri Lombok Barat. Menyelesaikan S1 di IKIP Malang memulai karirnya di Depdiknas, S2 dan S3 diselesaikan di Universitas Negeri Jakarta. Pernah menjadi Kakanwil Pendidikan NTB. Partai pendukungnya PPP dan PKB. Karena keislamannya yang kuat, ia juga dekat dengan Tuan Guru.

- **Nanang Samudra – M.Jabir**

Nanang Samudra adalah anak dari salah satu tokoh Sasak yang aktif di Muhammadiyah dan sempat jadi pejabat di NTB pada waktu Gubernur Wasita Kusumah dan Gatot Suherman, ia juga pendiri dan pemilik Universitas Al-Azhar Mataram. Sebelumnya sempat menjadi Wakil Ketua DPRD NTB dan Ketua PAN NTB. Nanang Samudra adalah keturunan Rumbuk Lombok Timur, alumni ITB Bandung. S2nya diselesaikan di Eropa, sekarang dalam penyelesaian S3 di salah satu universitas di Pulau Jawa. Ia memulai karirnya di kantor pemerintahan NTB, sempat menjadi cawagub berpasangan dengan Harun Arrasyid waktu “bersaing”

dengan kemenangan Lalu Serinate. Karir terakhirnya menjadi “Sekwilda NTB”. Sementara itu, wakilnya M. Jabir adalah ketua PAN NTB, ia adalah Wakil Bupati di Sumbawa Besar.

#### **4.6. PBB dan PKS Merangkul Tuan Guru Bajang**

Sejak NW terlibat dalam kancah politik, dinamika NW bukan hanya organisasi sosial keagamaan. NW dalam perjalanannya berkali-kali bergandengan tangan dengan partai politik. Tahun 70-an NW bergabung dengan Golkar, setelah itu NW keluar dari Golkar dikarenakan Golkar dianggap memojokkan umat Islam waktu itu. Terlibatnya NW di kancah politik membawa pada perpecahan organisasi ini menjadi dua kubu pasca meninggalnya pendiri NW, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yaitu kubu Anjani dan kubu Pancor. Dalam NW Kubu Pancor TGB sendiri yang menjadi ketua PB NW berafiliasi dengan PBB. Sementara itu NW Anjani pimpinan Umi Raihanun (PB NW Anjani) berafiliasi dengan PBR. Hal ini merupakan implikasi dari dinamika hubungan antara NW dan partai politik sejak tahun 1980-an.

TGB menikah dengan keluarga yang punya Universitas Asysafiah di Pondok Gede Jatiwaringin KH Abdullah Safei atau keponakan mantan Menteri Perempuan era Habibie, Tuty Alawiyah. TGB juga ipar mantan Menteri Yusril Ihza Mahendra (PBB). Dari situ kita bisa melihat mengapa TGB menjadi tokoh utama PBB di NTB.

PBB yang sejak awal merupakan partai politik yang membawa bendera Islam dan bercita-cita untuk menegakkan syariat Islam, memperkuat basisnya di pondok-pondok pesantren beserta para kyai atau tuan gurunya. Barangkali inilah salah satu alasan mengapa NW Pancor berafiliasi dengan PBB di samping Ketua PB sendiri TGB merupakan keponakan ketua Dewan Syuro PBB Yusril Ihza Mahendra.

Kharisma sang kakek ditambah dengan aktivitas dakwah TGB ke berbagai pelosok NTB yang sudah lama dirintis tentu

merupakan modal kultural TGB untuk hadiah kemenangannya sebagai Gubernur NTB. Menurut penulis pilihan PKS untuk merangkul TGB sebagai gubernur selain keinginan PKS merangkul kelompok Islam juga disebabkan oleh kedekatan ideologi antara PKS dan PBB yang sama-sama berbasis Islam dan bercita-cita untuk menegakkan Syariat Islam di bumi Indonesia. Konteks masyarakat NTB yang “kuat keislamannya” tentu menjadi sasaran empuk ormas Islam untuk menjalankan cita-cita politiknya.

Di samping itu kasus dugaan korupsi pada lawan-lawan politik TGB (terutama lawan terkuatnya Serinate) yang diperiksa oleh KPK juga ikut serta memperkuat TGB dan harapan masyarakat NTB pada pemimpin muda untuk tampil sebagai pemimpin mereka.

#### **4.7. Membangun Identitas Budaya Tanpa Kehilangan Karakter**

Tantangan NTB bukan hanya memperkuat pembangunan daerahnya yang tertinggal bila dibanding daerah-daerah lain di Indonesia, melainkan juga bagaimana memperkokoh identitas masyarakatnya di tengah globalisasi.

Naiknya Tuan Guru Bajang sebagai gubernur dalam sejarah politik NTB merupakan awal NTB dipimpin oleh ulama. Sebagaimana diketahui, NTB sejak dahulu yang menjadi pemimpin politiknya selalu dari kelompok bangsawan yang berafiliasi dengan penguasa-penguasa Bali dan kolonial di samping pemimpin-pemimpin dari luar NTB (waktu Orde Baru) dan raja-raja Bali serta bangsa Belanda pada masa kolonial.

Bila dilihat komposisi penduduknya NTB bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu kalangan bangsawan, santri dan masyarakat awam pada umumnya ditambah dengan masyarakat lain dari berbagai etnis dan agama. Keragaman kelompok masyarakat NTB menjadi tantangan tersendiri bagi TGB sebagai gubernur NTB. Saat ini TGB bukan hanya milik orang NW, melainkan milik warga NTB. Tantangan TGB sebagai pemimpin NTB bukan hanya

membangkitkan ekonomi dan pendidikan di NTB tetapi juga bagaimana menyikapi, toleransi pada pluralisme masyarakat NTB.

Kita mengetahui bahwa NW merupakan organisasi sosial keagamaan berbasis Islam. Wajah keislaman seperti apa yang akan ditampilkan oleh TGB untuk menyikapi keragaman dan tantangan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat NTB dikenal sebagai masyarakat agamis yang taat dan agak fanatis dengan agama dan pemimpin keagamaan (tuan guru). Paham keislaman yang sedikit berbeda di NTB menjadi sasaran kemarahan warga seperti kasus Ahmadiyah. Ditambah dengan rasionalitas beragama yang cukup memprihatinkan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia NTB.

TGB yang seorang *ulama* yang sekarang menjadi *umara* (*satria-pandito*) tentu sebuah tugas yang tidak mudah. Citra tuan guru sebagai orang yang saleh dan bersih akan dipertaruhkan pada kepemimpinan TGB, bila dia mampu memimpin masyarakat NTB ke arah kemajuan dan mampu bersih dan adil selama memimpin, masyarakat akan tetap dan kembali percaya pada para ulama yang amanah dan NW sebagai organisasi sosial keagamaan yang kokoh di NTB. Tetapi bila gagal citra tuan guru dan NW akan menjadi taruhannya.

Dengan memahami persoalan di depan, dapatlah dikatakan bahwa identitas budaya di daerah Mataram adalah merupakan hasil konstruksi dan penggunaannya selalu berubah-ubah bergantung dari elemen yang digunakan. Malah mengikuti perkembangan NW yang berbasis agama, ternyata identitas budaya bergantung pada konteks dan keadaannya. Walau di sini pertentangan berbagai etnik belum semua dipaparkan, tetapi sangat jelas antara berbagai kelompok tampak ada ketegangan dalam membangun identitasnya untuk kepentingan politik sesaat. Posisi kelompok etnik dalam pilkada pada saat pemilihan gubernur atau bupati, ternyata yang menentukan adalah “Tim Sukses” sekaligus yang membangun politik pencitraannya.

Proses-proses negosiasi antar kelompok dapat terjadi dan membuat salah satu kelompok etnik harus mengalah, misalnya hanya

menempati posisi “Wakil Gubernur” atau “Wakil Bupati”. Pada saat tertentu penanda identitas bisa diambil dari kelompok identitas milik pihak oposisi. Seperti dalam kasus *gubernur incumbent* Serinate, dahulu memakai kekuatan NW, kemudian pecah. Selanjutnya gubernur yang menang saat ini, juga tetap masih menggunakan NW sebagai kekuatan dengan ikon “Tuan Guru”. Jadi penanda identitas budaya dapat pula diambil dari oposisi milik kelompok lain yang berhubungan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. 1973. Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1973. Surakarta: Badan Penerbit Sasongko Solo.
- , 2000. *Karakteristik Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- , 2007. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2006*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- , tt. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azhar, Muhammad Lalu-Mimbarman, dkk. 1996. *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Favorit Offset Mataram.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Books.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beilharz, Peter, (ed.). 2002. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bennett, T. 1992. *Putting Policy into Cultural Studies*. L. Crossberg, C. Nelson, and P. Treichler, (ed.). *Cultural Studies*. London and New York: Routledge.
- Bleicher, Josef. 2003. *Hermeneutika Kontemporer*. penerjemah Imam Khoiri. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. London: Tavistock Publications.
- Budiwanti, Erni, 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS.
- Christomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). 2004. *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
- Retnowati, Endang dan Sutamat Arybowo. 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia: Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Industri Maju di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- . 1994. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gramsci, Antonio. 1999. *Sejarah dan Budaya*. penerjemah Ira Puspitorini dkk. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington, (ed.). 2006. *Kebangkitan Peran Budaya*. Jakarta: LP3ES.
- Hendrarso, E.S. 2005. Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Bagong Suyanto dan Sutinah, (ed.). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media. p. 165-175.
- Kartodirdjo, Sartono. 2003. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.

- , 2006. *Cultural Studies dan Masalah Kebudayaan di Indonesia* (makalah). Seminar Peringatan Berdirinya Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, 20 Februari.
- Kleden, Ninuk. 2004. *Membaca Politik Identitas Melalui Seni Pertunjukan*. Tommy Cristomy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: PPKB-UI. p. 201-214.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Masinambow, EKM. 2004. "Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya". dalam Cristomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Indonesia. p. 1-50.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi*. Jakarta: LP3ES.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: LPSP & PT Gramedia.
- Probonegoro, Ninuk Kleden, 2001. *Kesenian di Lombok: Representasi Dominasi Etnik*, Jakarta: PMB-LIPI.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Penerjemah Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.
- Sairin, Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto, (ed.) 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sutrisno, Mudji, dkk., (ed.) 2006. *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, (ed.) 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media.



- Thung Ju Lan, dkk. (ed.). 2002. *Etnisitas Dalam (Re)Konstruksi Identitas Lokal dan Nasional: Studi di Riau dan Mataram*. Jakarta: PMB-LIPI.
- Tim Peneliti. 2001. *Laporan Penelitian Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta: PMB-LIPI dan The Ford Foundation.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Depok: Desantara.



---

---

## **BAB V**

---

---

# **P E N U T U P**

## **(Identitas Budaya dan Konstruksi Budaya)**

Oleh Sutamat Arybowo, Endang Retnowati, dan Muh. Saleh Buchari, BM

**M**asyarakat di Kota Mataram termasuk memiliki budaya pluralis seperti yang dimiliki oleh kota-kota besar di Indonesia. Bahkan dapat dikatakan memiliki karakteristik sebagai kota metropolitan.

Saat ini Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki berbagai macam persoalan, baik yang dibawa para pencari kerja dari seluruh nusantara, maupun wisatawan asing yang lama kelamaan menetap dan menciptakan lapangan kerja di wilayah setempat. Juga dihadapkan oleh dampak pulau Dewata khususnya dari Denpasar Bali. Salah satu yang amat dirasakan penduduk setempat adalah adanya "*Cottage atau Bungalow*" di pantai Senggigi Lombok Barat, sebagai tempat "*rendezvous*" yang berorientasi usaha, serta bisnis yang menguntungkan dari keindahan pantai tersebut. Masyarakat Mataram yang mayoritas etnis Sasak amat kuat dengan tradisi budaya Islamnya, meski ada beberapa pendukung budaya dan tradisi lain seperti agama Hindu dan Kristen, tetapi tetap memperlihatkan corak serta karakteristik para penganut agama masing-masing. Dengan demikian mereka memaknai agama sebagai suatu fenomena kultural dan sering bertujuan untuk menyingkapi distorsi ataupun kesenjangan sosial antara perilaku berdasarkan konteks budaya lokal, juga ketentuan normatif dari kitab suci dan aturan yang bersifat universal.

Jati diri masyarakat Mataram khususnya suku bangsa Sasak telah dilindungi oleh tradisi lamanya dan menyatu dengan identitas ke-Islamannya. Dengan demikian Islam telah menjadi tradisi yang

berskala besar dari aspek kehidupan sehari – hari masyarakat suku bangsa Sasak. Simbol budaya masyarakat setempat dapat dilihat dari bentuk – bentuk rumah, tempat peribadatan seperti masjid, surau, langgar, sekolah atau pesantren yang bertuliskan kaligrafi huruf Arab serta Pura yang merupakan tempat sembahyang warga Hindu dan Gereja bagi umat Kristiani. Simbol itulah merupakan manifestasi dari para pendukung budaya masing – masing.

Berkaitan dengan masuknya globalisasi di daerah Mataram, satu hal yang penting dan perlu dinilai positif adalah visi pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Mataram yaitu menjadikan Kota Mataram sebagai kota “Ibadah” (Indah, Bersih, Aman, Damai, Agamis, dan Harmonis) yang “Maju dan Religius”. Visi demikian sangat berguna untuk menumbuhkan sikap mental yang sangat kuat dalam rangka menyikapi kemungkinan-kemungkinan negatif yang terjadi menjelang cepatnya arus globalisasi di Mataram.

Apabila dikaitkan dengan alam lingkungan, masyarakat Sasak memiliki pandangan tersendiri mengenai tanah. Tanah memiliki nilai sakral yang menyebabkan pemindahan hak tidak begitu mudah. Apabila terjadi perpindahan milik maka kepemilikan jatuh pada mereka yang memiliki garis keturunan atau hubungan darah. Perpindahan kepemilikan atau pewarisan dilakukan dengan cara mengganti biaya pengelolaan. Sedangkan kesakralan tercermin dalam perwujudan keyakinan orang Sasak bahwa tanah merupakan milik yang menuntut pertanggungjawaban dari pemiliknya baik di dunia maupun di akhirat. Status nilai demikian dipakai oleh masyarakat Sasak untuk menegakkan peradilan menyangkut perbuatan buruk, misalnya mencuri. Tertuduh biasanya disumpah dan diharuskan meminum air yang dicampur tanah oleh seorang tetua/ahli. Apabila tertuduh tidak mencuri maka ia akan menolak untuk meminumnya. Sebaliknya apabila tertuduh benar mencuri maka ia akan mengalami sakit dan lama kelamaan ia meninggal dunia.

Masyarakat Mataram memelihara budaya tradisional melalui berbagai bentuk kegiatan, misalnya menyelenggarakan upacara adat

yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan (kelahiran, ketika seorang anak menginjak dewasa, kematian), tradisi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad selama sebulan penuh, tradisi perkawinan, tradisi menyambut hari-hari tertentu di bulan puasa yang dianggap penting, dan tradisi-tradisi lain yang berkaitan dengan kelangsungan hidup sosial masyarakat Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan Masyarakat Mataram khususnya. Biasanya bersamaan dengan perayaan hari kelahiran Nabi masyarakat melakukan upacara potong rambut, atau sunatan atau acara lainnya. Kemampuan ekonomi turut menentukan perbedaan kemeriahan penyelenggaraan acara antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih menyelenggarakan peringatan kelahiran Nabi dengan cara mengundang para kerabat dan relasi-relasi mereka dalam bentuk pesta besar dan meriah. Sudah menjadi tradisi bahwa para tamu membawa bingkisan untuk tuan rumah, biasanya berupa gula pasir, ketika menghadiri undangan. Tradisi seperti itu hingga kini masih menjadi pewarisan di Kota Mataram. Pewarisan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat mencerminkan bahwa nilai kebersamaan dan nilai penghormatan kepada warisan leluhur masih tetap dilakukan dalam kehidupan masyarakat Mataram. Misalnya tradisi berdoa yang mencerminkan sikap dan tindakan mereka ketika mereka melakukan komunikasi dengan kekuatan-kekuatan gaib.

Selanjutnya cara membangun identitas kebudayaan terekspresikan pada pendirian organisasi NW dilatar belakangi oleh kebutuhan adanya suatu badan yang dapat berfungsi sebagai koordinator, pembimbing dan pengayom dari kegiatan madrasah Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nahdatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI). Organisasi tersebut telah berkembang pesat dengan banyaknya cabang-cabang kedua madrasah itu tersebar di berbagai wilayah dan desa di Pulau Lombok. Kedua madrasah itu, NWDI dan NBDI, kini telah diintegrasikan menjadi Pondok Pesantren Darun Nahdatain NW (PPDNW) Pancor yang menjadi induk madrasah NW yang tersebar di wilayah Nusantara.

Perjuangan NW dimulai sejak kelahiran Madrasah NWDI sudah mencapai 69 tahun lamanya, dari tahun ke tahun terus mengalami dinamika dan perubahan. Adapun perubahan penting yang dialami organisasi NW adalah berkembangnya peran dan fungsi NW sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjalankan aktivitas dalam bidang penguatan masyarakat sipil. Oleh karena itu NW sekarang dikenal sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Dalam perkembangannya Tuan Guru Bajang dijadikan ikon. K.H Muhammad Zainul Majdi, MA alias Taun Guru Bajang lahir di Pancor Lombok Timur pada tanggal 31 Mei 1972 M / 18 Rabiul Akhir 1392 H. Ia merupakan putra ketiga dari pasangan H.M Djalaluddin, SH dengan Ummi Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Madjid. Mengenyam pendidikan dasar di SDN 2 Mataram, Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah di Madrasah Mua'allimin Nahdatul Wathan Pancor, Ma'had Darul Qur'an wal hadist Nahdatul Waton Pancor. Kemudian ia melanjutkan studi di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al Qur'an Universitas Al Azhar Cairo (Mesir). Ia lulus meraih gelar Lc pada tahun 1995 dan Master of Art (MA) pada tahun 2000. Sejak tahun 2002 menjadi kandidat doktor di Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan ilmu-ilmu Al Qur'an Universitas Al-Azhar Cairo (Mesir). Pada tahun 1997 Tuan Guru Bajang menikahi Hajjah Rabiatul Adawiyah, SE putrid K.H Abdul Rasyid Abdullah Syafii, pimpinan Perguruan Islam Pondok Pesantren As Syafiiyah Jakarta.

Selain aktivitas dakwahnya yang makin luas baik di Nusa Tenggara Barat maupun di Jakarta dan sekitarnya, TGB juga mendapat sejumlah kepercayaan dari ummat yaitu sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan dan Anggota Komisi X DPR-RI periode 2004–2009. Ia juga memangku amanat sebagai Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) Pancor–Lombok Timur, ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi dan Pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wathan Pancor.

Tidak semua perjuangan menjadi lancar, karena pada akhirnya terjadi perpecahan di Tubuh Nahdlatul Wathan. NW sebagai

organisasi sosial kemasyarakatan semakin mengakar di tubuh masyarakat NTB. Sejak awal berdirinya tahun 1953 sampai era tahun 1980-an, pendiri NW—Maulana Syeh dan NW praksis tidak menunjukkan ketertarikan politik yang sungguh-sungguh. Kerja sosial tetap menjadi roh pertumbuhan NW yang semakin menyebar kemana-mana. Keputusan Maulana Syeh untuk mendukung Golkar pada tahun 1971, lebih disebabkan alasan idiologis ketimbang alasan politis. Dikarenakan hanya Golkar yang ketika itu mampu membendung arus komunisme di daerah Mataram.

Pada tahun 1982, ia memutuskan keluar dari Golkar dan membebaskan dukungannya untuk memilih salah satu partai. Keputusan tersebut tidak dipahami sebagai manuver politik melainkan cerminan dari kekecewaan mayoritas umat Islam di Indonesia terhadap Orde Baru yang semakin di dominasi militer yang represif terhadap umat Islam.

Kemudian pada 1987, ketika memutuskan kembali ke Golkar, di situ pertama kali ia mengambil sebuah keputusan politik. Sejak saat itu, meskipun NW tetap diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan sosial, namun mulai diperhitungkan sebagai sebuah kekuatan politik. Politik lantas seperti pisau bermata dua bagi NW. Di satu sisi, politik telah mempertajam kerja sosial NW, namun di sisi lain, politiklah yang telah membangun jarak antara NW dengan para ulama dan kelompok Islam lainnya di Lombok yang tidak satu afiliasi politik.

Politik pulalah yang pada akhirnya melatar belakangi terjadinya tragedi September 1998, yang menjadi embrio munculnya dua kubu NW: Anjani dan Pancor. Transformasi evolusi NW dari gerakan sosial menjadi gerakan politik semakin menjadi nyata, ketika konferensi wilayah NW secara resmi menghadang TGB Muhammad Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang) menjadi Gubernur NTB pada pilkada 2008.

Bagaimana Tuan Guru Bajang membangun identitas budaya tanpa kehilangan karakter? Tantangan daerah NTB bukan hanya memperkuat pembangunan daerahnya yang tertinggal bila dibanding

daerah-daerah lain di Indonesia, tetapi juga bagaimana memperkokoh identitas masyarakatnya di tengah globalisasi.

Naiknya Tuan Guru Bajang sebagai gubernur dalam sejarah politik NTB merupakan awal NTB dipimpin oleh ulama. Sebagaimana diketahui, NTB sejak dahulu yang menjadi pemimpin politiknya selalu dari kelompok bangsawan yang berafiliasi dengan penguasa-penguasa Bali dan kolonial di samping pemimpin-pemimpin dari luar NTB (waktu Orde Baru) dan raja-raja Bali serta bangsa Belanda pada masa kolonial.

Apabila di lihat komposisi penduduknya Mataram bisa dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu kalangan bangsawan, santri dan masyarakat awam pada umumnya ditambah dengan masyarakat lain dari berbagai etnis dan agama. Keanekaragaman kelompok masyarakat Mataram menjadi tantangan tersendiri bagi TGB sebagai Gubernur NTB. Saat ini TGB bukan hanya milik orang NW, melainkan ia milik warga NTB. Tantangan TGB sebagai pemimpin NTB bukan hanya membangkitkan ekonomi dan pendidikan di NTB tetapi juga bagaimana menyikapi toleransi pada pluralisme masyarakat NTB.

Kita mengetahui bahwa NW merupakan organisasi sosial keagamaan berbasis Islam. Wajah keislaman seperti apa yang ditampilkan oleh TGB untuk menyikapi keanekaragaman dan tantangan ekonomi yang semakin berat. Masyarakat NTB dikenal sebagai masyarakat agamis yang taat dan agak fanatis dengan agama dan pemimpin keagamaan (tuan guru). Paham keislaman yang sedikit berbeda di NTB menjadi sasaran kemarahan warga seperti kasus Ahmadiyah. Ditambah dengan rasionalitas beragama yang cukup memprihatinkan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia NTB.

Tuan Guru Bajang seorang *ulama* yang sekarang menjadi *umara (satria-pandito)* tentu sebuah tugas yang tidak mudah. Citra tuan guru sebagai orang yang saleh dan bersih akan dipertaruhkan pada kepemimpinan TGB. Bila ia mampu memimpin masyarakat NTB ke arah kemajuan, mampu bersih, dan adil selama memimpin, masyarakat akan tetap dan kembali percaya pada para ulama yang



amanah dan NW sebagai organisasi sosial keagamaan yang kokoh di NTB. Tetapi apabila ia gagal, citra tuan guru dan NW akan menjadi taruhannya.

Akhirnya persoalan di depan memperlihatkan bahwa identitas budaya yang terepleksikan dalam politik kebudayaan di daerah Mataram adalah merupakan hasil konstruksi dan penggunaannya selalu berubah-ubah bergantung dari elemen yang digunakan. Malah mengikuti perkembangan NW yang berbasis agama, ternyata identitas budaya bergantung pada konteks dan keadaannya. Walau di sini pertentangan berbagai etnik belum semua dipaparkan, tetapi sangat jelas antara berbagai kelompok tampak ada ketegangan dalam membangun identitasnya untuk kepentingan politik sesaat. Posisi kelompok etnik dalam pilkada pada saat pemilihan gubernur atau bupati, ternyata yang menentukan adalah “Tim Sukses” sekaligus yang membangun politik pencitraannya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anonim. 1973. Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1973. Surakarta: Badan Penerbit Sasongko Solo.
- , 2000. *Karakteristik Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Badan Pusat Statistik Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- , 2007. *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2006*. Mataram: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- , tt. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azhar, Muhammad Lalu-Mimbarman, dkk. 1996. *Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Sasak di Daerah Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Favorit Offset Mataram.

- Bagus, I Gusti Ngurah. 2004. *Mengkritisi Peradaban Hegemonik*. Denpasar: Kajian Budaya Books.
- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori & Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Beilharz, Peter, (ed.). 2002. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bennett, T. 1992. Putting Policy into Cultural Studies. L. Crossberg, C. Nelson, and P. Treichler, (ed.). *Cultural Studies*. London and New York: Routledge.
- Bleicher, Josef. 2003. *Hermeneutika Kontemporer*. penerjemah Imam Khoiri. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Bocock, Robert. 1986. *Hegemony*. London: Tavistock Publications.
- Budiwanti, Erni, 2000. *Islam Sasak: Wetu Telu versus Waktu Lima*, Yogyakarta: LKiS.
- Christomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). 2004. *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia.
- Retnowati, Endang dan Sutamat Arybowo. 2007. *Ketahanan Budaya dan Globalisasi di Indonesia: Studi Kasus Industri Makanan dari Negara Industri Maju di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- , 1994. *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gramsci, Antonio. 1999. *Sejarah dan Budaya*. penerjemah Ira Puspitorini dkk. Surabaya: Pustaka Prometheus.
- Harrison, Lawrence E. & Samuel P. Huntington, (ed.). 2006. *Kebangkitan Peran Budaya*. Jakarta: LP3ES.

- Hendrarso, E.S. 2005. Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar. Bagong Suyanto dan Sutinah, (ed.). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media. p. 165-175.
- Kartodirdjo, Sartono. 2003. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kleden, Ignas. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- . 2006. Cultural Studies dan Masalah Kebudayaan di Indonesia (makalah). Seminar Peringatan Berdirinya Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana, 20 Februari.
- Kleden, Ninuk. 2004. Membaca Politik Identitas Melalui Seni Pertunjukan. Tommy Cristomy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: PPKB-UI. p. 201-214.
- Maunati, Yekti. 2004. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Masinambow, EKM. 2004. "Teori Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan Budaya". dalam Cristomy, Tommy dan Untung Yuwono, (ed.). *Semiotika Budaya*. Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Indonesia. p. 1-50.
- Pelly, Usman. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi*. Jakarta: LP3ES.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1989. *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: LPSP & PT Gramedia.
- Probonegoro, Ninuk Kleden, 2001. *Kesenian di Lombok: Representasi Dominasi Etnik*, Jakarta: PMB-LIPI.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Said, Edward W. 1995. *Kebudayaan dan Kekuasaan: Membongkar Mitos Hegemoni Barat*. Penerjemah Rahmani Astuti, Bandung: Mizan.

- Sairin, Sjafri. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutrisno, Mudji, dkk., (ed.) 2006. *Cultural Studies: Tantangan Bagi Teori-Teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan.
- Thung Ju Lan, dkk. (ed.). 2002. *Etnisitas Dalam (Re) Konstruksi Identitas Lokal dan Nasional: Studi di Riau dan Mataram*. Jakarta: PMB-LIPI.